

**NILAI-NILAI ISLAM
DALAM REVOLUSI INDONESIA
(Kajian Masa Kepemimpinan Sukarno)**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Teologi Islam (S.Th.I)

Disusun Oleh:

**M. Alzim Suaidi Nas
NIM: 01520689**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

Prof. Dr. Siswanto Masruri, MA
Ahmad Muttaqin, S.Ag, MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 20 Juni 2008

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

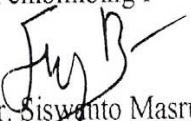
Nama : M. Alzim Suaidi Nas
NIM : 01520689
Jurusan : Perbandingan Agama
Fakultas : Ushuluddin
Judul Skripsi : Nilai-nilai Islam Dalam Revolusi Indonesia
(Kajian Masa Kepemimpinan Sukarno)

Maka selaku pembimbing pertama dan kedua, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

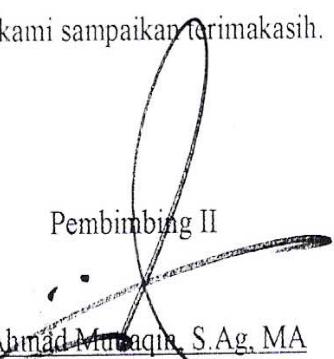
Demikian nota dinas ini kami ajukan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150 216 528

Pembimbing II


Ahmad Muttaqin, S.Ag, MA
NIP. 150 291 985



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-PBM-00-00/R0

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1463/2008

Skripsi dengan judul : “**NILAI-NILAI ISLAM DALAM REVOLUSI INDONESIA (KAJIAN MASA KEPEMIMPINAN SUKARNO)**”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. ALZIM SUAIDI NAS
NIM : 01520689

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 14 Agustus 2008 dengan nilai: B+. dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang

Ahmad muttaqin, M.Ag.,M.A.
NIP. 150 291 985

Penguji I

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag
NIP. 150 275 041

Penguji II

Ahmad muttaqin, M.Ag.,M.A.
NIP. 150 291 985

Yogyakarta, 14 Agustus 2008



MOTTO

"Tiap-tiap kamu adalah pengembala (pemimpin) dan kelak akan diminta pertangungan-jawab tentang pengembalaannya, pemimpin itu adalah pengembala dan kelak akan diminta pertangunganjawab tentang pengembalaannya, dan laki-laki itu adalah pengembala dalam keluarganya dan bertangung jawab tentang pengembalaannya, dan perempuan itu pengembala di rumah suaminya dan bertangung jawab tentang pengembalaannya, dan tiap-tiap kamu adalah pengembala dan bertangungjawab atas pengembalaannya." (H. R. Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

*Bundaku, kakak pertamaku Atho Illah, dan satu-satunya nenekku yang ada di
Jogjakarta Hj. Majeyah Said, serta semua keluargaku yang tercinta, doa
sampayan semua telah mengiringi kehidupanku selama ini, inilah
persembahan sementara yang bisa kuberikan semoga pada lain waktu aku bisa
memberikan karya dan persembahan yang lebih baik dan lebih bermakna bagi
kehidupan kalian.*

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
س	sa	S	es dengan titik di atas
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet dengan titik diatas
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es dengan titik di bawah
ض	dad	D	de dengan titik di bawah
ط	ta	†	te dengan titik di bawah
ظ	za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	...!...	koma terbalik di atas
غ	gayn	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap :

تَقْرِبٌ di tulis *taqarrub*

عَبَّاسٌ ditulis *'abbas*

3. Ta' Marbu'tah di akhir kata :

a. bila ta' marbutah dimatikan, ditulis h :

هَبَةٌ ditulis *hibah*

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau memiliki harkat hidup, ditulis t :

4. Vokal Pendek

ـ (fathah) ditulis a contoh حَرَبٌ ditulis *dharaba*

ـ (kasrah) ditulis i contoh فَهِيمٌ ditulis *fahima*

ـ (dammah) ditulis u contoh كُتُبٌ ditulis *kutubun*

5. Vokal Panjang :

Fathah+alif	ditulis	ā (garis di atas)
أولياء	ditulis	<i>Auliya'</i>
Fathah+alif maqsur	ditulis	ā (garis di atas)
يسعى	ditulis	<i>yas'a'</i>
Kasrah+ya mati	ditulis	ī (garis diatas)
سعيد	ditulis	<i>sa'īd</i>
dammah+wawu mati	ditulis	ū (garis di atas)
جلوس	ditulis	<i>julūs</i>

6. vokal rangkap :

a. fathah+ya mati	ditulis	ai
بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah+wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. kata sandang alif+lam

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf I-nya

الشمس ditulis *asy-syamsu*

8. huruf kapital

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). Seperti awal kalimat, nama orang dan sebagainya.

Contoh:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Qālā Rasūlullāh saw.

Kalimat Allah dapat ditulis capital kalau tidak disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

اَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis *ahlussunnah atau ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلٰهُ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَمِيعِ الْمُصَلِّيْنَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah Tuhan Sekalian Alam. Salāwat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah berkat Rida, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *nilai-nilai islam dalam revolusi indonesia* (Kajian masa kepemimpinan Sukarno, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana teologi Islam di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi tersebut terlaksana dengan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengarapan karya ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA dan bapak Ahmad Muttaqin, S.Ag, MA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan, dan kritik pada penulis, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis tidak lupa juga mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan yang penulis lakukan.

3. Ibu Ketua dan bapak Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan pada penulis untuk mengerjakan karya ini.
4. Bundaku dan kakak tertuaku yang telah memberikan segalanya bagi kesuksesan kuliahku, spirit moral dan finansial keduanya yang tiada henti adalah sangat berarti dalam kehidupanku selama ini, maafkan keterlambatan karya ini, danmaafkan pula atas pasang surutnya semangat Alzim selama ini, terutama di kala pengarapan karya ini.
5. Nenekku satu-satunya yang ada di Jogja, Hj. Majeyah Said terimah kasih atas dukungan moral dan finansialnya dalam pengarapan karya ini, semoga cucumu ini dapat meneladani langkahmu selama ini, yang kuangap sebagai tauladan hebat di antara keluarga besar kita.
6. Muajib, Azhari, Zainal Abidin Pati dan Nugroho yang sangat banyak membantu dalam memberikan pinjaman komputer dan mengedit karya ini sehingga dapat memperlancar penulis dalam proses pengarapan tugas akhir ini.
7. Untuk semua teman-teman masjid yang perna kutempati, semoga kalian semua dapat melanjutkan perjuangan kalian di kota pelajar tercinta ini, dan ingatlah keterbatasan finansial bukan halangan untuk meraih gelar sarjana dan impian kalian lainnya.
8. Teman-temanku semua selama penulis menempuh pendidikan di Jogja, semoga mereka yang telah mendahuluiku merampungkan tugasnya dapat segera menggapai cita-citanya selama ini, dan bagi mereka yang belum, semoga dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik dari karya-karya yang ada, terimah kasih atas semuanya selama ini, kalian semua sangat

mewarnai dan berarti dalam mengisilembar hidupku di Jogja, semoga jalinan silaturahmi kita tidak akan terputus meskipun diantara kita terpisahkan ruang dan waktu.

9. Semua civitas akademika UIN SUKA Yogyakarta terutama yang ada di fakultas Ushuluddin.

Mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangat kami nanti dan harapkan.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya mereka yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan dan pembaca pada umumnya.

Kepada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 1 Juli 2008
Hormat Penulis

M. Alzim Suaidi Nas
NIM. 01520689

ABSTRAK

Sejak hengkangnya penjajah yang telah lama memerintah, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, dan revolusi menjadi kata yang tak terelakan dalam upaya mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan penjajah tersebut. Dibawah kepemimpinan Sukarno bangsa Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat seperti bangsa-bangsa lain yang telah merdeka. Selama berlangsungnya kepemimpinan Sukarno, bangsa Indonesia berupaya mewujudkan bentuk terbaik bagi pemerintahan yang berupaya untuk dapat membawa warganya menuju negara yang mempunyai kekuatan dan daya tawar dalam peradaban manusia pada masa modern.

Dengan berdasarkan pertanyaan adakah sebenarnya nilai-nilai Islam pada masa kepemimpinan nasionalis pertama tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai Islam dalam masa kepemimpinan Sukarno. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang didasarkan pada pandangan Munawir Sjadzali tentang pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yang menurutnya terdiri dari nilai *as-Syūra* (Musyawarah), nilai *al-Musawah* (kesetaraan atau persamaan), nilai *al-Adālah* (keadilan), nilai *al-Hurriyyah* (kebebasan), dan nilai *al-Amānat* (kejujuran dan tanggungjawab). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis faktual, yaitu penelitian yang meneliti sejarah kepemimpinan Indonesia pada masa Sukarno dan menafsirkannya sesuai dengan kondisi sosial pada masa tersebut, serta mensintesanya agar memperoleh penjelasan objektif mengenai kepemimpinan Sukarno.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kehidupan kaum muslim Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno yang nota-bene dianggap sebagai kehidupan bernegara yang jauh dari nilai-nilai Islam, ternyata hasil penelitian yang ada menunjukan bahwa kehidupan bangsa Indonesia atau kaum muslim pada masa tersebut banyak mengandung nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bernegaranya. Dalam pelaksanaan demokrasi parlementer yang sempat dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun, Indonesia dapat melaksanakan iklim kehidupan bernegara yang berlandaskan pada musyawarah, persamaan, kebebasan, dan keadilan serta pemerintahan yang tanggungjawab, yang kelimanya merupakan nilai-nilai Islam yang sangat dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh nabi besar Muhamad Saw. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa yang dikenang sebagai masa keemasan demokrasi Indonesia tersebut berjalan sesuai dengan kehidupan negara-negara yang sudah lama melaksanakan kehidupan demokrasi, bahkan banyak pengamat asing terkagum dengan keberanian negara Indonesia melaksanakan kehidupan demokrasi, padahal pada masa tersebut Indonesia belum terlalu lama meraih kemerdekaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II NILAI-NILAI ISLAM TENTANG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA	22
A. <i>As-Syuro</i> (Musyawarah)	22
B. <i>Al-Musyawah</i> (Kesetaraan dan Persamaan).....	24
C. <i>Al-'Adalah</i> (Keadilan)	26
D. <i>Al-Hurriyyah</i> (Kebebasan)	28
E. <i>Al-Amanah</i> (Kejujuran dan Tanggungjawab)	29
BAB III IDEOLOGI YANG BERKEMBANG DAN POLEMIK BENTUK NEGARA PADA MASA KEPEMIMPINAN SUKARNO	31
A. Ideologi Yang Berkembang dalam Masa Revolusi Indonesia kepemimpinan Sukarno	31
1. Ideologi Sosialisme	32
a. PKI	33
b. Partai Sosialisme Murba.....	36

	c. PSI	37
2.	Ideologi Islam.....	39
	a. Partai Masyumi	41
	b. Partai NU	43
3.	Ideologi Nasionalisme atau PNI	46
B.	Pemikiran Sosio-Historis dalam Polemik Bentuk Negara...	50
	1. Negara Sosialisme	51
	a. Kudeta Tan Malaka	52
	b. Pemberontakan PKI	53
2.	Negara Federal	56
3.	Negara Islam	57
4.	Negara Persatuan	61
BAB IV	PENGARUH NILAI-NILAI ISLAM DALAM REVOLUSI INDONESIA PADA MASA KEPEMIMPINAN SUKARNO.....	63
A.	Nilai-Nilai Islam dalam Revolusi Indonesia pada Masa Kepemimpinan Sukarno	63
	1. Nilai-Nilai Musyawarah dalam Masa Kepemimpinan Sukarno	66
	2. Nilai-Nilai Persamaan dalam Masa Kepemimpinan Sukarno	82
	3. Nilai-Nilai Keadilan dalam Masa Kepemimpinan Sukarno	87
	4. Nilai-Nilai Kebebasan dalam Masa Kepemimpinan Sukarno	98
	5. Nilai-Nilai Amanah dalam Masa Kepemimpinan Sukarno	107
B.	Relevansi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Kini	112
BAB V	PENUTUP	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran-saran	121

DAFTAR PUSTAKA
CURRICULUM VITAE

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai landasan hidup secara menyeluruh bagi penduduknya telah dilakukan oleh para pejuang muslim sejak bangsa Indonesia belum meraih kemerdekaannya dari bangsa asing yang hal itu tetap berlangsung hingga saat ini.¹ Perjuangan untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh atau legal-formal pada mass kemerdekaan sebenarnya juga telah dilakukan dengan adanya Piagam Jakarta sebagai dasar negara yang akan diterapkan, namun itu tidak berhasil dilaksanakan karena ternyata Pancasila lebih dipilih untuk diterapkan oleh mayoritas para pendiri negara dari pada terns menggunakan piagam yang dianggap akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, dan menjadikan golongan lain menjadi **engan** untuk bergabung dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Piagam yang sangat berpihak pada masyarakat Islam tersebut dinilai tidak bisa mengakomodasi dan mengayomi seluruh anak bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Dalam petjalanan selanjutnya, nilai-nilai Islam tetap berusaha diterapkan oleh para pemeluknya dengan menerapkan secara substansial

¹ Pada masa lalu pemerintah kolonial berupaya menolak premis-premis orisional, dari sistem politik yang berbasis keagamaan, sistem politik yang memperoleh legitimasi dari agama diharamkan, lalu simbol dan struktur yang menghubungkan keduanya dirobohkan, sehingga tiada ruang bagi Islam dalam ran^g politik pribumi, yang itu membawa perubahan mental dan perceptual cukup signifikan dalam hubungan komunitas muslim lokal dengan dunia muslim lain. Lihat Yudi Latif, *Sekulerisasi Masyarakat dan Negara Indonesia*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gans AF, *Islam Negara dan Civil Society* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 120.

dalam kehidupan sosial bernegera pada segala bidang kehidupan yang ada. Di lain pihak upaya penerapan secara legal-formal juga tetap dilakukan, yang salah satunya termanifestasikan dalam pembentukan peraturan-peraturan dengan unsur-unsur clan simbol-simbol Islam di dalamnya, semua bentuk perjuangan tersebut tetap terns berlangsung clan telah banyak berhasil mewarnai kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Lalu adakah sebenarnya pengaruh nilai-nilai Islam di Indonesia pada masa lalu?, Atau tepatnya sejak Indonesia terlepas dari penjajahan bangsa asing. Pertanyaan tersebut tentunya menjaclikan penulis harus melihat sejarah kepemimpinan Sukarno agar mendapatkan jawaban yang sesuai mengenai adakah pengaruh nilai-nilai Islam dibawah kepemimpinan nasional pertama, setelah sebelumnya bangsa Indonesia hidup lama dalam penjajahan bangsa asing. Disamping itu, Sukarno yang sempat dibesarkan dalam lingkungan Islam clan juga menghadapi lawan-lawan politisi yang memperjuangkan penerapan Islam pada masa kepemimpinannya, tentunya pengaruh nilai-nilai Islam tetaplah sedikit banyak mewarnai kebijakan Sukarno dan jalannya kepemimpinan nasional pada masa tersebut. Dengan mengkaji sejarah konstalasi perpolitikan Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno diharapkan akan cliketemukan bagaimana pengaruh nilai-nilai Islam pada masa yang sempat menerapkan kehidupan demokrasi yang sangat demokratis selama sejarah Indonesia merdeka.

Sepak terjang Sukarno sebagai salah satu pemimpin gerakan rakyat yang sangat berpengaruh sejak masa pergerakan nasional, dan pengaruhnya

tiada tandingannya dibandingkan dengan tokoh-tokoh pergerakan lain. Ia adalah tokoh yang sangat populer di kalangan rakyat, dan dengan kepopulerannya juga telah mengantarkannya menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Pada awal kepemimpinannya memimpin negara Indonesia, Sukarno dihadapkan pada berbagai persoalan tentang bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan penjajahan kembali dan perlawanan dari sebagian gerakan rakyat yang tidak sepandapat dengan langkah perjuangannya. Dalam menghadapi persoalan tersebut, sang proklamator yang selalu menelungkungkan revolusi dalam memimpin bangsanya tersebut mengambil kebijakan cepat dan cenderung tergesah-gesah untuk segera mengatasinya, dan tidak jarang kebijakan yang ada harus mengorbankan sesama para pejuang yang berbeza haluan demi mewujudkan sebuah pemerintahan yang berdaulat.

Meskipun Sukarno dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya dan mempertahankannya, Berta merupakan presiden yang cukup lama dalam memimpin negara Indonesia, namun dalam masa kepemimpinannya, Sukarno bukanlah pemimpin sempurna yang dapat memenuhi harapan seluruh rakyatnya. Memang setelah Indonesia terlepas dari Belanda, Sukarno telah memberikan kebebasan rakyatnya dengan pemberlakuan demokrasi liberal, sebagai sistem yang secara luas dapat memberi ruang bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Pada masa tersebut, Seluruh komponen pendukung sebuah negara dapat berfungsi sesuai dengan kapasitasnya, sehingga demokrasi sipil dapat terlaksana dengan

semestinya. Namun masa tersebut tidaklah berlangsung lama, karena, keindahan demokrasi sipil harus mendapatkan gangguan dari intimidasi militer yang merasa diabaikan setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pemberontakan yang terjadi di luar pulau Jawa dan kekisruhan di parlemen yang tidak kunjung usai telah membuat Sukarno melakukan pembubaran demokrasi parlementer dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin, yang dianggapnya sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

B. Penegasan Judul

Untuk menyatukan persepsi, dan menghilangkan kesalahan dalam interpretasi yang mungkin timbul dari judul skripsi: "NILAI-NILAI ISLAM DALAM REVOLUSI INDONESIA, KAJIAN MASA KEPEMIMPINAN SUKARNO", maka penulis ingin menegaskan bahwa skripsi ini akan mengkaji masa kepemimpinan Sukarno dengan menggunakan nilai-nilai Islam, sedangkan penggunaan kata revolusi dalam judul skripsi di atas adalah untuk memberikan suatu identifikasi masa kepemimpinan nasional pimpinan Sukarno yang dinyatakan pelakunya sendiri sebagai suatu masa revolusi yang ternyata berlangsung dan selalu digelorakan secara tuntas menerus dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa tersebut.²

² Sukarno sendiri beranggapan, seperti dalam pidatonya ketika ia berupaya untuk mengubur partai-partai pada masa akhir demokrasi parlementer, bahwa juhunatakan bahwa revolusi adalah satu proses yang dinamis, proses yang berjalan. Dan proses itu berjalan oleh karena itu di dalam revolusi itu adalah revolusi bersambung-sambung: rentetan ketidaksenangan . rentetan dari pada kejadian-kejadian yang mendesak manusia berjalan ke maka mereka protes. berjahui kerumunan memprotes. berjalan ke maka mereka protes, Lihat Bung Kanio. *Ilocana Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 162.

C. Rumusan Masalah

Adakah nilai-nilai Islam dalam revolusi yang terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai Islam dalam revolusi Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Memberikan sumbang saran bagi pemikiran keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.
2. Dalam rangka menyelesaikan program kesarjanaan strata 1 (satu) dalam bidang ilmu Perbandingan Agama di fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Kajian terhadap revolusi Indonesia dalam masa kepemimpinan Sukarno adalah kajian sejarah yang tentunya mengaitkan dengan para pelaku yang terlibat dalam masa kepemimpinan tersebut. Dengan demikian dalam proses pembuatan skripsi ini penulis tidak saja mengambil literatur yang berkaitan dengan kehidupan Sukarno, tetapi penulis juga akan mengambil literatur-literatur dari sejarah kehidupan tokoh-tokoh lain yang terlibat dan cukup mewarnai jalannya kepemimpinan nasional pertama setelah kemerdekaan Indonesia tersebut. Buku-buku yang penulis maksud di antaranya adalah, buku biografi Hatta yang ditulis Mavis Rose yang berjudul

Biografi Politik Muhammad Hatta dan buku sejenis karya Delier Noor. Kedua buku tersebut banyak juga menjelaskan kiprah kepemimpinan Sukarno dalam pandangan Hatta. Sebagai salah satu proklamator dan wakil presiden pertama republik Indonesia, Hatta merupakan tokoh yang banyak terlibat dalam masa kepemimpinan Sukarno. Buku biografi sangat membantu untuk mengetahui lebih jelas dari orang-orang yang banyak terlibat langsung dalam perjalanan kepemimpinan bangsa sendiri pada masa modern.

Buku *Tan Malaka Dibumuh*, karya Yunior Hafidh Hery adalah buku yang banyak menjelaskan kondisi Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, terutama kiprah Tan Malaka dalam masa transisi Indonesia tersebut. Keberadaan buku ini banyak membantu untuk menjelaskan sejarah Indonesia yang "tersembunyi" dan belum sempat terungkap pada buku-buku sejarah yang lebih dikenal kalayak.

Buku *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Syahrir*, karya J. D. Legge, adalah buku yang banyak menjelaskan tentang kiprah Syahrir dan kelompoknya dalam mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Syahrir dan kelompoknya bukanlah kelompok dominan dalam keberlangsungan kepemimpinan Sukarno, namun Syahrir merupakan tokoh yang berjasa besar dalam upaya diplomasi bagi kemerdekaan Indonesia. Buku ini tentunya sangat membantu dalam menjelaskan kiprah kepemimpinan Sukarno dalam pandangan kaum intelektual, seperti Syahrir dan kelompoknya.

Buku *Capita Selecta* karya M. Natsir, yaitu buku yang menjelaskan pandangan Natsir tentang keislaman yang juga dikaitkannya dengan persoalan kenegaraan Indonesia. Dalam buku ini Natsir juga mencoba mengaitkan Islam dengan pelaksanaan sistem demokrasi yang sedang berkembang pesat, dan tidak luput pula perdebatan-perdebatan ia dengan Sukarno tentang landasan negara Indonesia yang terjadi sejak akhir kekuasaan pemerintahan Belanda.

Karya-karya Sukarno yang terdokumentasikan dalam sebuah buku yang berjudul, *Dibawah Bendera Revolusi*. Buku ini banyak menjelaskan tentang karya-karya Sukarno sejak masih muda hingga masa kemerdekaan, termasuk perdebatannya dengan tokoh Islam seperti A. Hasan dari Persatuan Islam (Persis).

Komunitas Nasionalis Religius Indonesia juga menerbitkan buku yang berjudul: “*Bung Karno, Islam, Pancasila dan NKRI*”, yaitu sebuah buku yang berisi karya-karya Sukarno yang berkaitkan dengan keislaman yang terdokumentasikan. Buku ini berisi surat-surat Sukarno kepada beberapa tokoh Islam Indonesia dan ormas-ormas Islam yang ada. buku ini juga berisi pidato-pidato Sukarno dalam peringatan hari-hari besar agama Islam, dan pidato-pidatonya pada acara yang diadakan oleh ormas Islam.

Ketiga buku terakhir di atas adalah buku yang menjelaskan Pandangan Sukarno dan sebagian kecil tokoh lain tentang relevansi Islam dengan negara Indonesia. Meskipun pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam ketiga buku tersebut juga mewarnai perjalanan kepemimpinan Sukarno, dan sebagian

besar adalah pemikiran sewaktu Sukarno menjadi presiden, namun ketiga kajian buku tersebut berbeda dengan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Buku-buku yang termasuk kategori buku biografi kehidupan Sukarno, merupakan buku yang bisa menjelaskan secara terperinci tentang kepemimpinan sang proklamator Indonesia tersebut, dan buku-buku biografinya yang penulis dapat adalah, pertama buku yang berjudul, *Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka*, yang ditulis oleh Bob Hering. Hering menulis sejarah kehidupan Sukarno dari masa kecil, dan hal-hal yang mempengaruhi pola pikirnya selama ini, hingga posisi dan peranan Sukarno dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia di tahun 1945, dan tak kalah pentingnya adalah peristiwa-peristiwa menegangkan selama sebelum dan sesudah dilaksanakannya proklamasi. Buku ini hanya melihat Sukarno dan peranannya sebagai proklamator dan founding father Indonesia, meskipun Bob adalah orang Belanda kelahiran Indonesia yang mengagumi Sukarno dan sempat bertemu dengannya, tetapi ia tidak berupaya mengkultuskan sang proklamator tersebut. Sayangnya buku ini tidak disertai dengan analisa tentang signifikansi peran nilai-nilai Islam, yang memang terbukti punya kontribusi besar dalam mewarnai pergulatan sengit tokoh-tokoh yang mengitari kehidupan politik Sukarno.

Kedua, Bernhard Dham dalam bukunya “*Sukarno dalam Perjuangan Kemerdekaan*”, dari buku ini Dahm melihat sebagai sosok jawa yang singkretis bahkan meragukan keislamannya. Dahm melihat bahwa Sukarno itu bukan seorang muslim yang baik tetapi lebih ke arah seorang marxis

Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari kecendrungan Sukarno pada faham sosialisme daripada faham lainnya. Hanya saja dalam buku ini Dahm lebih banyak menyoroti pengaruh-pengaruh budaya Jawa, yang diterima Sukarno sejak masa kecil, yang dalam masa selanjutnya juga banyak mempengaruhi konsep-konsep pemikirannya dalam kepemimpinan nasional.

Ketiga, Buku yang ditulis oleh Darmawan M.M dengan judul "*Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*". Dalam buku ini Darmawan mencoba menampilkan tentang riwayat hidup Sukarno dari masa pembentukan yang menyangkut kehidupan pribadi Sukarno sampai pada masa membangun negara dan mempertahankan keutuhan bangsa hingga terbentuknya demokrasi terpimpin.

Buku yang ditulis oleh Mr. S.M. Amin, *Indonesia dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin*", adalah buku yang membahas secara tajam tentang sepak terjang politik Soekarno selama menjabat sebagai Presiden pada masa demokrasi terpimpin. Buku ini sayangnya belum cukup mewakili untuk mendeskripsikan keseluruhan kepemimpinan Sukarno dan nilai-nilai Islam yang mengitarinya, dan tentunya isi buku ini sangat berbeda dengan apa yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Buku yang berjudul *Islam dan Politik "Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, karya Ahmad Syafii Maarif merupakan buku yang menjelaskan kiprah politik kaum muslimin, terutama tingkah laku politik partai-partai Islam dalam salah satu masa kepemimpinan Sukarno, tepatnya pada periode demokrasi terpimpin (1959-1965). Dengan sistem baru

yang diterapkan Sukarno menyebabkan partai-partai Islam harus menempuh jalan bersibak dua, terlibat dalam sistem baru tersebut dan bisa terus hidup atau mati dikubur karena dianggap sebagai golongan yang kontra revolusioner. Meskipun buku ini membahas masa kepemimpinan Sukarno dan nilai-nilai Islam yang mengitarinya, namun penekanan buku ini hanya pada salah satu masa kepemimpinan Sukarno dan sepak terjang partai-partai Islam saja.

Robert W. Hefner, seorang antropolog Amerika dan Indonesianis terkemuka dengan bukunya *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia* menjelaskan peranan kaum sipil Indonesia, terutama kaum sipil muslim dalam mewarnai perpolitikan Indonesia, dan buku tersebut juga menjelaskan kiprah sipil muslim dalam masa kepemimpinan Sukarno. Hefner melalui buku ini menjelaskan bahwa peranan sipil muslim dalam perjalanan perpolitikan Indonesia tidak terbatas pada partai-partai dan organisasi Islam saja, tetapi peranan sipil muslim sudah melintas batas pada partai-partai yang tidak berideologi Islam. Isi buku ini berbeda dengan kajian dalam skripsi ini, karena buku tersebut lebih menfokuskan pada kiprah sipil muslim di Indonesia selama ini, sedangkan skripsi ini akan menekankan pada nilai-nilai Islam di Indonesia terutama pada masa kepemimpinan Sukarno.

Jeanne S. Mintz dalam bukunya yang berjudul, *Mohammed, Marx dan Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, menulis tentang macam-macam gerakan sosialis yang ada pada awal berdirinya negara Indonesia, yang secara garis besar pemahaman sosialisnya terbagi menjadi Islam atau Muhammad yang

diwakili Masyumi, marxisme yang diwakili oleh PKI, marhaenisme yang diwakili oleh PNI dan PSI serta Partai Murba, dan tidak ketinggalan juga adalah keberadaan Partai Sosialis yang mencoba mencari titik temu antara faham sosialisme dunia dengan keadaan kondisi masyarakat Indonesia. Buku tersebut juga banyak menjelaskan kiprah kepemimpinan Sukarno, bahkan menjelaskan juga sosialisme alah Sukarno yang telah termanifestasikan dalam ideologi marhaenismenya dan sistem demokrasi terpimpinnya. Penekanan dalam buku ini berbeda dengan apa yang akan ditulis dalam skripsi ini, karena buku ini lebih mengkaji pada ideologi sosialismenya pada masa pembentukan dan kemerdekaan Indonesia dan bukan pada nilai-nilai Islamnya, seperti yang akan dikaji dalam skripsi ini.

M. C. Ricklef dalam bukunya yang berjudul, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004* menjelaskan tentang peranan Islam dalam sejarah panjang bangsa Indonesia sampai pada abad millennium, termasuk di dalamnya juga masalah dalam masa kepemimpinan Sukarno. Buku ini isinya berbeda dengan skripsi ini, karena buku Ricklef tersebut lebih pada tulisan sejarah Indonesia secara umum, yang di dalamnya juga ada peranan Islam, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada nilai-nilai Islam dalam masa kepemimpinan Sukarno sebagai salah satu tahapan sejarah Indonesia yang ditulis profesor Australia tersebut.

Idris Thaha dalam bukunya yang berjudul, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais* menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia selama ini, yang di dalamnya juga

menjelaskan tentang pelaksanaan kebebasan dan keadilan dalam sejarah selama Indonesia merdeka hingga saat ini. Meskipun buku tersebut menjelaskan tentang keadilan dan kebebasan dalam masa kepemimpinan Sukarno, namun buku ini lebih melihat pada pelaksanaan demokrasinya dan bukan nilai-nilai Islam seperti yang dibahas dalam skripsi ini

Disertasi Faisal Ismail yang sudah dibukukan, yang berjudul *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Respon dan Penerimaan Umat Islam Terhadap Pancasila*. Disertasi ini menjelaskan tentang respon dan penerimaan umat Islam terhadap Pancasila sebagai ideologi negara selama keberlangsungan negara Indonesia. Sukarno sebagai pencetus Pancasila, adalah presiden yang sering digugat umat Islam karena telah mencetuskan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan bukan menggunakan ideologi Islam. Keberadaan ideologi Pancasila sejak kelahirannya memang telah menimbulkan pro-kontra, terutama bagi aktifis muslim Indonesia, yang memandang ideologi sekuler dan tidak cocok bagi bangsa Indonesia yang religius. Meskipun buku ini banyak menjelaskan kepemimpinan Sukarno, namun kajian buku ini berbeda dengan yang akan dikaji dalam skripsi ini, karena skripsi ini akan lebih menekankan nilai-nilai Islam yang mempengaruhi kepemimpinan sang proklamator tersebut.

Disertasi Yudi Latif yang sudah dibukukan, yang berjudul *Intelelegensia Muslim dan Kuasa, Sejarah Intelelegensia Muslim dan Kuasa di Indonesia pada Abad Ke-20*, adalah buku yang menjelaskan tentang peranan para intelelegensia atau kaum intelektual Indonesia dalam sejarah perjalanan

kehidupan bangsa Indonesia selama abad ke-20, terutama peranan para intelektual muslim dalam masa tersebut. Buku ini menjelaskan kiprah para kaum intelektual dalam masa kepemimpinan Sukarno, tetapi penjelasan dalam skripsi ini akan berbeda dengan penjelasan yang dimaksudkan dalam buku ini, karena buku ini lebih menekankan pada para peranan kaum intelektual pada masa kepemimpinan Sukarno, sedangkan skripsi ini akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang mempengaruhi nilai-nilai Islam dalam masa tersebut.

Adapun skripsi tentang Sukarno yang penulis ketahui adalah skripsi di Fakultas Ushuluddin yang ditulis saudari Munawaroh, yang berjudul *Hubungan Islam dan Sosialisme Pandangan Sukarno*. Skripsi ini lebih melihat kecenderungan Sukarno pada upaya menggabungkan sosialisme dengan agama mayoritas yang dianut rakyat Indonesia, yang dalam kehidupan perpolitikan nasional telah menjadi kekuatan politik tersendiri. Sosialisme terutama komunisme yang dalam kaca mata umat Islam Indonesia telah tercoreng dan cenderung dimusuhi, oleh Sukarno mencoba untuk diberikan pengertian bahwa sosialisme dan Islam pada dasarnya mempunyai kesamaan misi untuk melawan kekuatan kapitalisme dan imprealisme yang telah mulai menggerita negara Indonesia.

Panji Nugraha Ruhiat dalam skripsinya yang berjudul, *Dekrit Presiden dalam Hukum Tatanegeara di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi ini lebih menyoroti pada dekrit yang ditinjau dari hukum tata negara terutama tata negara Islam, dan judul skripsi di atas jelas berbeda dengan kajian dalam skripsi ini, karena skripsi saudara Panji lebih menyoroti pada

dekrit presiden, dan bukan mencakup seluruh nilai-nilai Islam dalam kebijakan Sukarno selama memimpin bangsa seperti yang akan dikaji skripsi ini.

Skripsi yang berjudul, *Demokrasi Terpimpin Menurut Idham Khalid dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, yang disusun oleh Ahmad Muhajir menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran tokoh NU tersebut yang memandang bahwa demokrasi terpimpin Soekarno tidaklah bertentangan dengan ideologi Islam. Selain karena alasan-alasan politis, Idham juga beralasan bahwa konsep demokrasi terpimpin tersebut sangat menonjolkan musyawarah mufakat, yang itu berarti sangat sejalan dengan konsep syuro, dan dengan pemikiran tersebut Idham berusaha melegitimasi keputusan NU yang mendukung keberadaan sistem demokrasi terpimpin pimpinan Sukarno.

Dari buku-buku, disertasi-disertasi, dan skripsi-skripsi tersebut di atas tidak ada yang secara khusus membahas masalah signifikansi peranan nilai-nilai Islam dalam berlangsungnya revolusi Indonesia. Dengan demikian skripsi ini akan mencoba mengkaji masalah di atas terutama revolusi Indonesia dalam masa kepemimpinan Sukarno, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya skripsi ini akan dimengerti kontribusi besar nilai-nilai agama, terutama Islam dalam sejarah revolusi Indonesia

F. Kerangka Teori

Nilai-nilai yang terwujud dalam kebaikan, kebenaran, dan keindahan akan selalu menyertai segala aspek kehidupan manusia, dan penyimpangan dari ketiganya akan mengakibatkan tidak berkualitasnya hidup, serta akan

mengurangi kesempurnaan yang diidamkan.³ Perhatian terhadap nilai-nilai akan menjadikan manusia lebih arif dan bijaksana dalam menentukan arah kehidupan selanjutnya, sehingga kesalahan-kesalahan masa lalu tidak akan terulang kembali pada kehidupan di masa mendatang.

Agama adalah sesuatu yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia, karena agama menyangkut asal usul pertama dan tujuan akhir dari kehidupannya. Agama mempunyai peranan yang sangat penting, dan lebih penting dari kepentingan lainnya bagi manusia. Agama menyangkut hubungan antara individu dengan sang penciptanya, sehingga keberadaannya adalah menjadi begitu dibutuhkan.

Suatu perjuangan mencari Tuhan sebagai tujuan akhir dengan keyakinan atas bantuan-Nya yang kekal dan penuh cinta telah menjadikan manusia dapat memenuhi kebutuhan moralnya dan mencapai kesempurnaan tertinggi dalam hidupnya. Nilai-nilai kudus yang terdapat dalam agama menjadikannya menghasilkan pengetahuan intuitif yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dengan pengetahuan, kehendak dan perasaannya yang ia miliki, manusia dapat menjalani kehidupan yang terarah dan tidak mengalami kegalauan hidup.⁴ Penyerahan diri pada Tuhan tidak akan membuat manusia mengalami kekhawatiran kehilangan kebebasan, seperti wayang yang tidak bernyawa. justru dengan melakukan penyerahan diri manusia akan mengalami pemuncakan eksistensinya, tetapi bukan eksistensi yang sewenang-wenang,

³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 716-717.

⁴ *Ibid.* hlm. 12-16.

melainkan bersedia untuk menerima tanggungjawabnya sebagai khalifah di dunia.⁵

Meskipun modernisasi telah menghilangkan nilai-nilai agama dalam rana kehidupan manusia, dengan menjadikannya hanya bisa masuk kedalam wilayah privat dan tidak boleh mencampuri urusan kemasyarakatan. Namun sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan dirinya untuk menjadikan agama untuk terus berperan dalam wilayah kehidupan masyarakatnya. Kerinduan manusia akan kebenaran membuat manusia tiada hentinya menjadikan agama sebagai titik tolak kehidupannya, karena pada dasarnya agama adalah kebenaran yang akan selalu ada dalam kehidupan ini, dan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun.⁶

Menjadikan agama sebagai titik tolak kehidupan, bukan berarti harus menjalankan agama hanya sesuai dengan yang tertulis di kitab suci, dan sekedar mengikuti ritual-ritual pendahulu tanpa melakukan upaya reinterpretasi dan reaktualisasi kembali tafsir teks-teks keagamaan yang telah mapan, karena dengan melakukan kedua upaya tersebut pemahaman masyarakat pemeluk agama akan menemukan kesesuaian dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi yang terkandung dari teks-teks tersebut.⁷ Teks-teks keagamaan adalah produk masa lalu, yang

⁵ Frans Magnis Suseno, *Menalar Tuhan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 211.

⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Pengetahuan dan Kesucian*, terj, Suharsono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 77.

⁷ Muhammad Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*, terj, Ilham B. Saenong (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 247.

tentunya tidak lepas dari konteks zaman di mana teks itu diturunkan dan ditulis, dan tentunya pemahaman-pemahaman terhadapnya pun tidak terlepas dari nuansa pemikiran yang berkembang pada saat itu, dan dipaksakannya pemahaman masa lalu akan membuat pemahaman pemeluk agama menjadi terisolir dari dinamika kehidupan.⁸

Menganggap Islam sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia dengan menjadikannya sebagai petunjuk perbuatan di dunia, tidak serta merta harus menjadikan Islam secara formal diterapkan dalam bernegara, tetapi Islam juga dapat diterapkan dengan cara yang lebih fleksibel dengan golongan lain, yaitu dengan pengaplikasian Islam yang substantif melalui penekanan terhadap penggunaan akal dengan melalui proses ijtihad. Pada dasarnya Al-Qur'an hanya memberikan solusi segala persoalan secara global dan tidak detail, dan dalam tata negara kitab tersebut hanya memberikan wawasan, dan bukan konsep yang matang tentang masyarakat, politik, atau negara.⁹

Menurut Munawir Sjadzali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau tata negara al-Qur'an menganjurkan pada umat manusia untuk memperhatikan prinsip-prinsip *as-Syūra* (Musyawarah), *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'Adālah* (keadilan), *al-Hurriyyah* (kebebasan),

⁸ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 298.

⁹ Lihat Bahtiar Effendy, *Demokrasi dan Agama, Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af. *Islam Negara dan Civil Society* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 162-163.

dan *al-Amānat* (tanggung jawab).¹⁰ Kelima prinsip tersebut cukup mewakili tuntunan Islam tentang kehidupan bernegara, dan apabila sebuah negara telah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, meskipun negara yang bersangkutan tidak pernah mencantumkan syariat Islam sebagai landasan negaranya. Sehingga bisa disimpulkan apabila sebuah negara telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan negaranya, maka negara tersebut dijamin dalam penyelenggaraan kehidupan negaranya akan mendapatkan kehidupan negara yang sangat dicintai dan dihargai oleh seluruh warga negaranya, bahkan bisa menjadi panutan bagi negara-negara lain.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, yakni pendekatan membaca, menafsirkan dan mensintesakan dengan menggunakan sumber dokumen masa lalu sesuai dengan kondisi sosial pada masa itu.¹¹ Perkembangan ilmu-ilmu sosial telah memungkinkan sejarah dipandang bukan hanya sebagai suatu dokumen masa lalu yang tidak berarti, tetapi sejarah merupakan seni dan ilmu yang sangat berarti bagi rekonstruksi kehidupan manusia masa lalu sehingga dapat berarti bagi kehidupan masa

¹⁰ Menurut mantan menteri agama tersebut dalam al-quran islam memberikan penjelasan bahwa tata Negara harus berdasarkan pada musyawarah atau konsultasi, ketaaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan juga kebebasan beragama. Lihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 4.

¹¹ Romdhon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.62

kini. Menggunakan pendekatan historis bukan berarti hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis sehingga harus kritis dan jujur.¹² Historis yang dimaksudkan di sini adalah historis faktual yang berarti meneliti perjalanan kepemimpinan Sukarno melalui buku-buku sejarah dan karya-karya teks yang berkaitan dengan kepemimpinannya, dan menafsirkannya sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masa hidupnya, serta mensintesakannya agar memperoleh uraian atau penjelasan objektif mengenai sejarah kepemimpinannya.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan menghimpun keterangan-keterangan dari buku literatur serta artikel di internet, yang dalam hal ini berupa sejarah kepemimpinan Sukarno ataupun karya-karya yang mengkaji tentang Sukarno, baik sebagai pustaka utama atau pustaka primer, serta hasil-hasil penulisan yang telah dipublikasikan maupun dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3. Pengolahan dan Analisa Data

Penulis mengadakan pengumpulan tulisan dan data yang berhubungan dengan tema di atas, kemudian menelaah data yang telah terkumpul tersebut dengan menganalisa dan menginterpretasi sesuai dengan kemampuan dan wawasan penulis, sehingga diperoleh pengertian yang jelas, disertai analisis yang deskriptif. Penelitian dengan metode

¹² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 166.

deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterpretasi objektif tentang permasalahan yang diteliti.¹³ Jadi cakupannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tetapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data tersebut.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa deskripsi adalah representasi objektif terhadap permasalahan yang dikaji. Hal ini membuat karya ilmiah mengalami kesulitan untuk menghindari unsur subyektifitas, sehingga tidak dapat dikatakan suatu studi yang benar-benar obyektif, akan tetapi suatu studi dapat dikatakan karya ilmiah sepanjang obyektifitasnya tidak terkalahkan subyektifitasnya. Oleh karenanya, proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif dan deduktif.¹⁵ peneliti akan berusaha untuk mengontrol diri untuk tidak bertindak terlalu subjektif, dalam arti bahwa tidak tercampur-adukan pendapatnya dengan kenyataan masalah, baik dalam pola maupun materi deskripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematik serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam rencana penulisan skripsi ini akan digunakan sistematika sebagai berikut:

¹³ Jacob Vrendenberg. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 34.

¹⁴ Winarno Surachmad. *Dasar dan Teknik Research: Pengamatan Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1970), hlm. 131.

¹⁵ Anton Baker dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 43-45.

Bab I. Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Pendahuluan ini dimaksudkan sebagai penuntun bagi pembahasan selanjutnya.

Bab II. Bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, yang hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga pandangan para ulama dan cendekiawan muslim.

Bab III. Menjelaskan faham-faham dan aliran pemikiran yang berkembang pada masa revolusi Indonesia. Pembahasan ini, meliputi; Pertama, ideologi dan kiprah partai dalam masa revolusi Indonesia, antara lain, sosialisme, nasionalisme dan Islam. Kedua, Pemikiran sosio-historis dalam polemik bentuk negara, yang dalam hal ini, antara lain menjabarkan bentuk negara sosialis, negara federal, negara Islam, dan negara kesatuan.

Bab IV. Analisa atas pengaruh nilai-nilai Islam dalam revolusi Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno disertai dengan polemik ideologi perebutan pengaruh dan kekuasaan kekuatan-kekuatan di sekitar sang pemimpin revolusi. dilanjutkan dengan refleksi penulis tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa kini yang dikaitkan dengan relevansi nilai-nilai Islam yang digunakan untuk menilai kepemimpinan Sukarno.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir dari pembahasan masalah ini, yang penulis ambil dari bab sebelumnya serta kritik dan juga saran atau himbauan yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

BAB II

NILAI-NILAI ISLAM TENTANG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Sebagai agama yang diturunkan untuk menuntun kehidupan umat manusia, Islam banyak memberikan tuntunan kepada para pemeluknya untuk menjalankan tata kehidupan bersama dengan sebaik-baiknya. Meskipun dalam interen umat Islam pada masa modern terdapat perdebatan tentang keharusan atau tidaknya kaum muslimin mendirikan sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam, namun pada umumnya para ulama dan cendekiawan muslim tetap melandaskan pendapat mereka tentang tata kehidupan masyarakat muslim pada lima nilai Islam, yang itu terdiri dari, *as-Syūra* (Musyawarah), *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'Adālah* (keadilan), *al-Hurriyyah* (kebebasan), dan *al-Amanat* (tanggung jawab). Dan untuk lebih jelasnya penjelasan nilai-nilai tersebut akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini.

A. *As-Syūra* (Musyawarah)

Musyawarah, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Landasannya firman Allah SWT yaitu:

وامرهم شورى بينهم ...¹

¹ As-Syūra (42): 38.

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam dalam hubungan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara musyawarah merupakan suatu yang diwajibkan bagi para penguasa dan seluruh rakyatnya. Para penguasa diwajibkan untuk bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga segala hal yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak atau kemaslahatan bersama.² Dengan musyawarah semua persoalan bersama kemungkinan besar dapat terselesaikan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, karena keputusan yang diambil merupakan bersama. Keengganan pemimpin untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, mengakibatkan dirinya menjadi diktator. Diktator pada hakikatnya adalah kesewenang-wenangan, yang itu berarti pemaksaan dan ketakaburan dan itu juga berarti melawan hukum Tuhan. Dalam keimanan Islam sifat diktator akan membawah kegelapan pada kehidupan dunianya dan juga pada kehidupan di akhirat.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman yang dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu, musyawarah itu lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk

² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 58.

meninggalkannya.³ Sebagaimana petunjuk al-Qur'an, nabi telah mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Meskipun seorang rasul, beliau sering bermusyawarah atau berkonsultasi dengan para pengikutnya. Di samping sering berkonsultasi dengan para sahabat senior dan para profesional yang dianggap mengerti dengan permasalahan yang dihadapi, namun tidak jarang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang dianggap berkaitan dan berdampak pada kalangan luas di masyarakatnya.⁴

B. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Kesetaraan atau persamaan, yaitu pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi kesukuan, ras, agama, jenis kelamin dan kelas sosial.⁵ Landasan mengenai kesetaraan ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا يَاهُ النَّاسُ انَا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذِكْرٍ اَوْ اُنْثِي وَجَعَلْتُكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَائِيلٍ
لَتَعْلَمُوا اَنَّا اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَنْتُمْ ...⁶

Persamaan merupakan ajaran Islam yang paling mendasar dan dipandang cukup urgen penerapannya dalam suatu kehidupan, karena pada

³ *Ibid.* hlm35.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 16-17.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah"* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 190-191.

⁶ Al-Hujurat (49):13.

dasarnya Islam tidak pernah mengajarkan perbedaan perlakuan dalam hal apapun antara sesama makhluk Tuhan. Islam tidak akan pernah memberikan keistimewaan perlakuan terhadap individu atau kalangan tertentu, sehingga individu atau kelompok lain menikmatinya.⁷ Sebagai agama tauhid Islam sangat menekankan bahwa setiap manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan, sama hak dan kewajibannya, dan sama-sama tunduk pada sunatullah.⁸ Dalam keimanan dan ketakwaan, Islam tidak pernah membedakan antara muslim arab dan nonarab, dan tiada jaminan bahwa yang kebetulan beriman lebih dahulu berarti lebih baik dari pada yang beriman yang belakangan, hal ini membawah kesimpulan, bahwa Islam sangat menjunjung derajat kemanusiaan di antara sesama manusia tanpa dibedakan antara satu sama lain.

Persamaan hak merupakan tujuan diutusnya para rasul dan juga diturunkannya syariat bagi sekalian umat manusia. Persamaan hak merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi suatu dasar agar menjadi suatu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi manusia.⁹ Islam memberikan jaminan persamaan yang mutlak dan sempurna pada masyarakat, dan bertujuan merealisasi kesatuan kemanusiaan dalam bidang peribadatan dan sistem kemasyarakatan.¹⁰ Komitmen Islam tentang persamaan hak bagi semua warga

⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainudin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 45.

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 187.

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, hlm. 221.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 150.

kemasyarakatan.¹⁰ Komitmen Islam tentang persamaan hak bagi semua warga negara dapat dirujuk dari sikap nabi pada umatnya di masa awal penyebaran Islam, di mana pada masa tersebut, nabi memberikan perlindungan dan hak yang sama pada seluruh warga Madinah.

C. *Al-'Adālah* (Keadilan)

Keadilan, yaitu menetapkan suatu baik berupa hukum, peraturan, dan kebijakan harus sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa pandangan dan kepentingan subyektif. Pelaksanaannya juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.¹¹ Landasan mengenai keadilan ini disebutkan dalam al-Qur'an :

..وَلَا يُجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدُ لَوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ...¹²

Petunjuk pertama dari Tuhan yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam mengenai berbuat adil adalah Al-Qur'an, sunnah, dan syariat, yang dalam statusnya masing-masing merupakan kalimat Tuhan yang telah ada dan dapat dibuktikan. Seorang muslim yang baik akan menganggap hukum Tuhan dan ajaran nabi merupakan petunjuk utama untuk dapat memahami keadilan dan bertindak dengan adil. Karena hidup dan bertindak sesuai dengan aturan

¹⁰ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 150.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 189

¹² Al-Maidah (5): 8.

syariat berarti dapat bersikap adil terhadap Tuhan dan juga terhadap diri dan sesama makhluknya.¹³

Keadilan tak bisa dipungkiri merupakan masalah pokok yang terus mengiringi perjalanan kehidupan manusia semenjak makhluk Tuhan yang paling mulia tersebut diturunkan ke muka bumi. Penekanan Islam pada keadilan juga tidak terbantahkan, karena begitu banyak ayat Al-Qur'an yang mengutuk keras segala bentuk ketidakadilan yang terjadi pada jamannya. Keadilan dalam Islam sendiri bertujuan tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat.¹⁴

Dalam salah satu pernyataan Abu Bakar setelah beliau diangkat menjadi khalifah adalah, bahwa anggota-anggota masyarakat yang lemah merupakan pihak yang kuat, karena ia sebagai pemimpin berkewajiban untuk memenuhi hak mereka semua, dan sebaliknya anggota-anggota masyarakat yang kuat baginya merupakan orang-orang yang harus banyak berurusan dengannya untuk bersama-sama melayani masyarakat yang lemah.¹⁵ Dari contoh kasus di atas menunjukkan, bahwa komitmen kuat pemimpin muslim pada masa awal tersebut untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga tidak ada tujuan lain daripada kehidupan dunia ini kecuali menegakkan keadilan dan kebenaran.

¹³ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, terj. Nurasiah Fakih Sutan Harahap, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 305.

¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, hlm. 17.

¹⁵ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 28.

D. *Al-Hurriyyah (Kebebasan)*

Kebebasan yaitu, adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar, bertanggungjawab dan mencerminkan akhlak yang baik.¹⁶ Landasan tentang kebebasan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ...¹⁷

Kehidupan nabi SAW yang berhadapan langsung dengan kehidupan perbudakan pada masa tersebut, membuat al-Qur'an banyak menjelaskan tentang pembebasan manusia dari adanya perbudakan yang ada.¹⁸ Meskipun tidak secara langsung membebaskan sistem perbudakan, namun al-Qur'an sangat mengecam perlakuan sewenang-wenang para majikan pada budaknya. Kedatangan para nabi terdahulu dijelaskan juga oleh al-Qur'an sebagai bentuk upaya membebaskan manusia dari adanya perbudakan yang terjadi di kaumnya. Didasari dengan kenyataan, bahwa kedatangan Islam dengan spirit pembebasan yang luar biasa pada masa lampau, tentunya komitmen Islam tentang kebebasan dalam kehidupan bernegara tidaklah berbeda jauh. Penekanan adanya kebebasan yang memberikan keleluasaan pada setiap warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya tanpa adanya tekanan dari

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 197.

¹⁷ At-Taubah (9): 105.

¹⁸ Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial, Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta: Elsaq, 2005), hlm. 191.

penguasa merupakan komitmen Islam yang memang dari awal kedatangannya membawah panji-panji kebebasan.

Kebebasan dalam beragama juga sangat ditekankan dalam al-Quran, karena ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diperbolehkannya pilihan untuk melakukan kebebasan dalam beragama, seperti dalam satu ayat dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah.”.

E. Al-Amānat (Kejujuran dan Tanggungjawab)

Al-amānat (*responsibility*) yaitu seorang pemimpin pada hakikatnya ia memegang amanat, dan harus dapat melaksanakan serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT dan rakyat yang telah memberi kepercayaan padanya. dalam salah satu ayat dinyatakan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... (Al-Nissa: 58)

Dan sebagaimana juga bunyi hadist yang menegaskan :

كلم راع وكلم مسئول عن رعيته الامام راع ومسئول عن رعيته...¹⁹

Pemimpin yang bisa dipercaya merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya sebuah kepemimpinan yang baik. Salah satu sifat nabi yang

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. *Sahih al-Bukhāri*, , “*Kitab al-Ahkam*” (Kairo: Dar el-Fikr, 1981 H), VIII: 104. Hadis diriwayatkan Ismail dari Malik dari Abdullāh bin Umar.

paling menonjol sejak beliau masih belia adalah al-Amin atau terpercaya, nabi adalah orang yang paling jujur dan itu telah diakui masyarakat Arab kejujurannya pada masa tersebut. Memang diakui pemimpin yang amanah adalah sangat sedikit jumlahnya, namun di samping nabi masih ada manusia-manusia yang jujur yang dapat dipercaya untuk mengemban tanggungjawab besar serta dapat memimpin sebuah komunitas dengan baik.

Kelima prinsip atau nilai inilah yang menjadi dasar terselenggaranya suatu negara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Aplikasinya dapat dilakukan lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kepala pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam menegakkan kehidupan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Meskipun ada juga para ulama dan cendekiawan muslim yang menambahkan dengan prinsip persaudaraan (*al-Ukhuwah*), menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-Ta'*, *addu'diyah*), mendahulukan perdamaian (*al-Silm*) dan kontrol (*amr bi ma'ruf nahy an al-munkar*), namun pada umumnya para ulama dan cendekiawan muslim tetap menggunakan prinsip atau nilai-nilai Islam yang telah dijelaskan di atas.

BAB III

IDEOLOGI DAN KIPRAH PARTAI SERTA POLEMIK BENTUK NEGARA DALAM MASA KEPEMIMPINAN SUKARNO

A. Ideologi dan Kiprah Partai dalam Masa Kepemimpinan Sukarno

Dalam perpolitikan sebuah negara, ideologi adalah sesuatu yang sangat penting dan benar-benar vital bagi keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Ideologi yang pada dasarnya adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dippunyai dan dipegang suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan dunia mereka.¹ Ideologi yang didefinisikan oleh A.S. Hornby sebagai "seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dipegangi seseorang atau kelompok", telah memberi kebanggaan dan kekuatan yang bisa mengilhami untuk mencapai cita-cita sosial dan politik. Ideologi politik menjadi penggerak dinamis yang utama dalam kehidupan organisasi atau lembaga politik, karena ideologi berfungsi "menyatukan rakyat dalam organisasi politik untuk melakukan tindakan politik secara efektif." Lebih dari itu, "tujuan ideologi adalah untuk membangkitkan perasaan dan mendorong munculnya tindakan, sedangkan

¹ Alfian, "Ideologi, Idealisme dan Integrasi Nasional". Lihat dalam Yahya Muhamin dan Colin Mac Andrew (eds), *Masalah-Masalah Pembangunan Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hlm. 88.

kekuatan ideologi terletak pada kapasitasnya dalam menangkap dan mengerakan imajinasi manusia serta melepaskan energi-energi manusia".²

Konstalasi politik nasional yang melibatkan berbagai ideologi, sebenarnya sudah lama terjadi sebelum bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Perdebatan mengenai ideologi perjuangan di antara para tokoh nasional merupakan sesuatu yang biasa dilakukan sejak mereka masih dalam masa pergerakan nasional, akan tetapi proklamasi kemerdekaan yang telah membuka pintu bagi berbagai ideologi politik untuk dapat berkiprah secara bebas dalam dinamika perpolitikan bangsa.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kiprah partai-partai politik besar, dan beberapa partai kecil tetapi cukup berpengaruh, yang terlibat dalam konstalasi politik pada masa kepemimpinan Sukarno. Pembagian partai-partai politik tersebut akan penulis masukan ke dalam kategori tiga ideologi besar yang menjadi landasan bagi kiprah partai-partai, pertama, ideologi sosialisme, kedua, ideologi Islam, dan ketiga, ideologi nasionalisme.

1. Ideologi Sosialisme

Pada dasarnya seluruh gerakan yang ada di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, merupakan gerakan-gerakan yang mendasarkan diri pada faham sosialisme yang dipadukan dengan faham anti kolonialisme, penggunaan faham sosialisme adalah sebagai bentuk perlawanan gerakan-gerakan tersebut terhadap adanya penjajahan bangsa

² Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama, Respons dan Penerimaan Umat Islam Terhadap Pancasila* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 15-16.

asing yang sedang terjadi di Nusantara. Ideologi sosialisme yang sejak awal kelahirannya merupakan ideologi yang berusaha melawan perkembangan kapitalisme, adalah ideologi yang banyak digunakan berbagai gerakan di semua bangsa yang mengalami kolonialisme. Sosialisme dengan segala perangkatnya merupakan satu-satunya ideologi di dunia yang dianggap sangat konsisten melawan semakin mengguritanya kekuatan kapitalisme, yang sejak lama juga menopang proses kolonialisme yang dilakukan bangsa barat.

Pada penjelasan Ideologi sosialisme kali ini, penulis akan menjelaskan kiprah tiga partai yang mendasarkan gerakannya pada ideologi sosialisme yang sedang berkembang di dunia pada saat itu. Ketiga partai ini pada masa kepemimpinan Sukarno merupakan partai yang cukup berpengaruh, dan mampu turut andil dalam mewarnai perjalanan kepemimpinan sang proklamator. Meskipun ketiganya bukanlah partai pendulang suara mayoritas dalam beberapa pemilihan yang telah diselenggarakan, namun ketiganya tetaplah kekuatan yang sangat diperhitungkan bagi kekuatan lain yang berkiprah dalam pentas perpolitikan nasional.

a. PKI

PKI merupakan partai resperentasi dari kekuatan blok komunisme dunia yang berpusat di Uni-Soviet. Partai ini sudah lama berdiri semenjak bangsa Indonesia belum meraih kemerdekaannya, dan merupakan partai yang selalu dapat membahayakan pemerintahan

yang ada pada jamannya. Dengan mengusung slogan persamaan yang selalu didengungkannya, PKI selalu mengajak rakyat untuk melakukan revolusi merubah tatanan mapan yang telah membelenggu kehidupannya. Pada masa kebangkitan nasional, tokoh-tokoh PKI memilih bergabung dengan Sarikat Islam (SI), yang dianggap sebagai gerakan yang masif dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

PKI yang didirikan kembali pada oktober 1945,³ pada awalnya merupakan partai yang mendukung revolusi kemerdekaan yang sedang diperjuangkan seluruh komponen bangsa. Meskipun pada dasarnya pengembalian tokoh-tokoh partai ini dari pengasingan dilakukan Belanda untuk menyerang pemerintahan kepemimpinan Sukarno-Hatta, pemerintahan yang dianggap pihak Belanda sebagai pemerintahan pimpinan kolaborator Jepang dan harus dirampas kekuasaannya, namun dalam kenyataannya ketika sudah sampai di Indonesia, tokoh-tokoh PKI tersebut berbalik tujuan dengan mendukung pemerintahan, dan sebagian kadernya banyak terlibat dalam kabinet pemerintahan.⁴ Dukungan tokoh-tokoh PKI pada pemerintahan transisi tersebut tidak berjalan lama, karena ketika masih berlangsungnya revolusi kemerdekaan, PKI telah melakukan

³ Jeanne S. Mintz, Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia, terj. Zulhilmiyasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 122.

⁴ *Ibid*, hlm. 122-123.

pemberontakan yang menambah persoalan nasional pada tahun 1948 di Madiun.

Setelah peristiwa pemberontakan di Madiun, PKI berusaha kembali berkiprah dalam perpolitikan nasional dengan memperbaiki citra partai yang telah tercoreng. Dalam waktu yang relatif singkat, PKI telah mampu memperbaiki citranya serta dapat berkiprah kembali pada pemilu 1955. Pada pemilu diadakan pertama kali tersebut, PKI berhasil menjadi pemenang keempat, perolehan suaranya merupakan terbanyak dibandingkan dengan partai-partai yang berideologi Sosialis lain.

Perkembangan pesat PKI dan kemahirannya untuk merebut simpati presiden, telah membuat partai komunis pertama di Asia Tengara ini menjadi kekuatan yang dominan dalam pentas perpolitikan Nasional. Melalui propogandanya yang agresif, PKI mampu menyingkirkan dominasi kekuatan partai lain dalam pemerintahan. Masa terakhir demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin PKI dapat menikmati "kemesraannya" dengan Sukarno, PKI bisa mengoptimalkan figur Sukarno untuk memperluas dukungan rakyat pada partai, sedangkan Sukarno sangat diuntungkan dengan dukungan PKI dalam mensosialisasikan gagasannya tentang arah revolusi yang sedang dibangunnya.

b. Partai Sosialisme Murba

Partai Sosialisme Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948,⁵ partai ini berasal dari Gerakan Revolusi Rakyat(GRR)⁶ yang didirikan Tan Malaka pada masa revolusi kemerdekaan, sebelumnya ia juga telah mendirikan Persatuan Perjuangan(PP).⁷ Pendukung partai ini bukanlah berasal dari kader-kader hasil perekrutan yang dilakukan pada saat revolusi kemerdekaan berlangsung dan turut berjuang bersama tokoh komunis nasionalis yang telah mendirikan gerakan cikal-bakal dari partai Murba tersebut. Dukungan lain yang didapatkan Murba adalah, Kemampuannya dalam mempertahankan hubungan baiknya dengan pihak militer, yang terjalin dalam masa perjuangan revolusi kemerdekaan, dan merupakan kelebihan tersendiri partai ini dibandingkan dengan partai-partai lain.⁸

Bagi Murba ideologi partai tidak terlalu penting bagi eksistensinya dalam perpolitikan di tanah air. Ideologi komunis yang dianut Tan Malaka, tidak menjadi keharusan bagi partai untuk berpatokan pada komunisme sebagai landasan ideologi politiknya.

⁵ Yunior Hafidh Hery, *Tan Malaka dibunuh*. hlm. 177.

⁶Gerakan Revolusi Rakyat adalah fusi yang sedianya inginmempersatuak kekuatan nasional untuk menentang arah politik likuidasi UUD RI 1945. Lihat dalam *ibid*. hlm. 178.

⁷Persatuan Perjuangan (PP) berdiri 15-16 Januari 1946 di Surakarta. Tujuannya pembentukannya adalah menyatukan beberapa partai dan front perjuangan untuk menolak pendirian partai dalam masa revolusi kemerdekaan, tujuan lain PP adalah mengulangkan Sukarno dan menumbangkan pemerintahan. Lihat dalam J. D. Legge. *Kaum Intelektual Dan Perjuangan Kemerdekaan. Peranan Kelompok Syahrir*. Terj. Hasan Basari. cetakan ke-2. (Jakarta: Garfiti,2003), hlm. 198. Lihat juga dalam *ibid*, hlm. 169.

⁸*Ibid*. hlm. 193.

Para simpatisan Murba adalah orang-orang yang dapat bekerja sama dengan lintasan golongan dari partai-partai yang berbeda, dan hal tersebut mereka lakukan tanpa adanya ketakutan melunturkan komitmennya pada partai.

Murba dalam masa kepemimpinan Sukarno lebih memanfaatkan momentum untuk mempertahankan keberadaan simpatisannya dalam pemerintahan. Salah satu bukti pernyataan tersebut adalah keberadaan partai ini sebagai partai pertama yang mendukung tanpa syarat rencana Sukarno yang ingin mengubur partai-partai karena akibat polemik di antara wakil sipil yang tidak berkesudahan.

c. PSI

PSI yang didirikan Syahrir pada masa revolusi kemerdekaan pada awalnya bertujuan untuk melanjutkan kiprah pendidikan nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya memperjuangkan pendidikan bangsa dan telah berkiprah cukup lama di Belanda. Perjuangan tersebut dilakukan Syahrir bersama para mahasiswa Indonesia yang berkesempatan menempuh pendidikannya di negeri penjajah Indonesia. Sebelum mendeklarasikan PSI, Syahrir bersama pengikutnya terlebih dahulu mendeklarasikan Partai Sosialis bersama

Amir Syarifudin pada masa awal kemerdekaan, partai ini berdiri karena adanya pengabungan dua partai yang berideologi Sosialisme.⁹

Partai ini dengan pengalaman tokoh-tokonya yang sebagian besar menempuh pendidikan di Belanda banyak terinspirasi dari wawasan-wawasan sosial-demokrat di Eropa, yang mengabungkan persepsi mengenai kontradiksi-kontradiksi yang melekat pada kapitalisme dengan kepercayaan bahwa masyarakat sosialis dapat diwujudkan dalam suatu kerangka demokratis.¹⁰

Kader-kader PSI dalam kiprahnya lebih disibukkan dengan upaya pencarian yang tepat tentang ideologi sosialisme dan penerapannya dalam konteks keindonesiaan, sehingga kondisi tersebut telah melupakan keberadaan partai untuk mengembangkan basis dukungannya. Idealisme tersebut telah membuat mereka berpisah dengan kelompok Amir Syarifudin yang lebih mementingkan pengarahan masa daripada berlutut pada konsep sosialisme bagi pembangunan bangsa.

⁹ Partai Sosialis berasal dari pengabungan dua partai yang berideologi sosialisme, kedua partai tersebut adalah Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang dibentuk pengikut Syahrir untuk melanjutkan perjuangan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang ada di Belanda, dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang dipimpin Amir Syarifudin. cikal-bakal partai ini salah satunya berasal dari Gerindo sebagai gerakan yang menghubungkan sentimen nasionalisme untuk melawan kebangkitan fasisme diseluruh dunia, kelompok ini dalam gerakannya sempat melakukan kerjasama dengan Belanda untuk merealisasikan tujuan tersebut. Partai Sosialis akhirnya bubar dikarenakan perbedaan yang tajam antara Syahrir dan Amir Syarifudin tentang ideologi perjuangan Sosialisme di Indonesia. Lihat dalam J. D. Legge, *Kaum Intelektual Dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Syahrir*, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 197-198.

Meskipun PSI adalah partai kecil dan nyaris tersingkir dalam pemilu 1955 karena penurunan suara yang merosot tajam, namun keberadaan Syahrir dan tokoh-tokoh penting lainnya menjadikan partai ini tetap penting bagi perpolitikan nasional. Sejak masa revolusi kemerdekaan, Syahrir merupakan tokoh yang selalu diminta pendapatnya untuk mengatasi problem kenegaraan nasional, dan ia merupakan tokoh yang lebih mengedepankan perjuangan diplomasi dibandingkan dengan perjuangan lain. Pada masa akhir sistem demokrasi parlementer, banyak tokoh partai ini yang terlibat dalam pemberontakan yang mengakibatkan partai ini bersama partai Masyumi menjadi partai yang dibubarkan melalui dekrit presiden.¹¹

2. Ideologi Islam

Perjuangan para pahlawan Islam pada masa lalu dalam melawan dan mengusir Belanda adalah perjuangan yang terinspirasi dari agama dan komitmen kuat terhadap agama yang mereka anut. Semangat perjuangan itu begitu mendalam dan bersandar pada idealisme serta kesediaan untuk berkorban yang bersumber kepada keyakinan terhadap Allah SWT. Revolusi Islam yang dijalankan para pahlawan Islam Indonesia pada masa lalu bukanlah revolusi yang hanya menyandarkan pada wilayah negara, tetapi lebih dari itu adalah revolusi untuk membebaskan umat manusia dari eksplorasi fisik dan spiritual yang mengacuh pada teori, karakter, sifat,

¹¹ Jeanne S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, hlm. 185-192.

ciri-ciri yang berlandaskan pada wahyu dari Tuhan yang telah disampaikan melalui utusannya Muhammad SAW.

Keberadaan Islam sebagai agama mayoritas pada masyarakat Indonesia mempunyai peranan yang sangat berarti bagi proses persatuan rakyat Indonesia dalam melakukan perjuangan merebut kemerdekaan. Islam telah menjadi simbol pemersatu bagi rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajah. Sarikat Islam (SI) sebagai organisasi politik Islam pertama yang berdiri telah mampu merubah organisasi Islam di Indonesia menjadi modern dan demokratis serta mampu merubah keberadaan organisasi Islam sebelumnya yang lebih bersifat komunal dan tradisional, menjadi integrasionalis dan sistemik dalam pergerakannya.¹² Dalam perjalannya SI telah menjadi kekuatan pemersatu yang cukup berpengaruh dalam pergerakan nasional, ini dibuktikan dengan keberhasilan SI yang mampu meraih dukungan mayoritas dari rakyat. Bahkan SI menurut Mohamad Roem¹³ merupakan gerakan pertama yang mampu mengintegrasikan persatuan nasional melalui kongresnya di tahun 1916, dan bukan Budi Utomo pada tahun 1908, seperti yang sering disebutkan dalam sejarah nasional. Pada kongres

¹² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan,1991). hlm.195.

¹³ Mohamad Roem adalah salah satu pejuang dari golongan tokoh nasionalis Islam dan ia merupakan tokoh penting Masyumi awal yang juga banyak terlibat dalam sejarah kepemimpinan Sukarno.

pertamanya tersebut SI telah menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan.¹⁴

Islam sebagai Ideologi partai dalam sejarah konstalasi politik Indonesia berlangsung berdasarkan pemahaman keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Meskipun sejak penjajahan Jepang umat Islam telah bersatu dalam satu federasi yang kemudian menjadi satu-satunya partai bagi umat Islam Indonesia, namun dalam perjalannya, kemesraan umat Islam dalam wadah satu partai tersebut tidak berjalan lama, karena perbedaan latar belakang tradisi keagamaan dan adanya marginalisasi pada kelompok muslim yang dianggap tidak mumpuni untuk mewakil Islam dalam perpolitikan nasional pada masa kepemimpinan Sukarno.

a. Partai Masyumi

Pada awal keberadaanya, Masyumi merupakan sebuah federasi yang menampung seluruh organisasi Islam yang ada di seluruh Nusantara di masa penjajahan Jepang. Federasi itu dilanjutkan menjadi sebuah partai yang di putuskan dari sebuah pertemuan lanjutan di Surabaya.¹⁵ Ikatan organisasi partai Masyumi hanya didasarkan pada identifikasi gerakan Islam tanpa membedahkan heterogenitas yang terjadi di antara anggotanya.¹⁶ Keberlangsungan persatuan umat Islam

¹⁴ Mohamad Roem. *Diplomasi = Ujung Tombak Perjuangan RI*, kumpulan karangan (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.214-215.

¹⁵ *Intelelegensi Muslim dan Kuasa, Sejarah Intelelegensi Muslim Indonesia pada Abad Ke-20*, hlm. 160.

¹⁶ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bahtar (Yogyakarta:Lkis, 2003), hlm. 98-99.

dalam wadah satu partai tersebut tidak bertahan lama karena sejak masa revolusi kemerdekaan telah terjadi perpecahan yang tidak terhindarkan dengan keluarnya beberapa anggota organisasi partai akibat diperlakukan tidak adil. Meskipun terus terjadi perpecahan dalam internal partai, Masyumi tetap dapat bertahan dan merupakan partai terbesar di Indonesia pada dasawarsa 1940-1950.

Dengan mengusung persaudaran dan persamaan yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, Masyumi membedahkan diri dengan ideologi yang diperjuangkan partai-partai lain. Mengenai konsep keadilan Sosial, partai ini beranggapan bahwa keadilan Sosial yang diajarkan Islam sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh Sosialisme Marxis, karena Sosialisme religius telah menghapuskan Individualisme yang sangat ditekankan kapitalisme dan kesadaran kelas yang dikembangkan Marxisme. Perumusan-perumusan ideologi tersebut dilandaskan pada pemahaman proresif atau liberal terhadap Al-Qur'an dalam kehidupan beragama yang dipadukan dengan sikap terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi dan politik yang sedang berkembang.¹⁷

Masyumi sejak masa demokrasi parlementer merupakan salah satu partai penentang keinginan presiden, yang ingin berperan aktif dalam pemerintahan. Bahkan sebagai respresentasi kekuatan umat Islam terbesar, Masyumi menjadi salah satu partai oposan yang cukup galak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 118-119.

dalam melawan kebijakan pemimpin revolusi Indonesia tersebut. Pada masa demokrasi terpimpin, Masyumi tidak disertakan Sukarno dalam pemerintahan yang mengusung Nasakom sebagai tiga pilar persatuan yang sedang digalang, ini dikarenakan sebagian tokoh Masyumi juga terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan di daerah.

b. Partai NU

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada bulan Januari 1962 di Surabaya. Sebelum menjadi partai politik, NU hanyalah sebuah organisasi Islam yang menaungi masyarakat muslim tradisionalis dan bergerak pada bidang sosial keagamaan.¹⁸ Dalam masa kebangkitan nasional, Perjuangan NU lebih difokuskan pada upaya pengakuan eksistensi kaum Islam tradisionalis yang terancam dengan sikap agresif kaum modernis Islam untuk memonopoli perwakilan muslim dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum muslim lain di dunia. ketertarikan organisasi tradisional muslim terbesar ini terhadap isu kenegaraan, baru terjadi pada akhir penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Sebelumnya NU lebih berkutat pada persoalan penerapan hukum Islam, seperti yang mereka pelajari dalam kitab-kitab fikih klasik. Pada tahun 1941, NU melalui sebuah rapat

¹⁸ Pendirian NU pada 1926 adalah bentuk respon kaum muslim tradisionalis terhadap pendirian dua organisasi modernis muslim yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Organisasi-organisasi tersebut adalah Muhamadiyah yang bergerak pada kesejahteraan dan dakwah masyarakat muslim, sedangkan Syarikat Islam bergerak dalam gerakan perlawanannya terhadap hegemoni kekuatan asing. Kedua organisasi yang bercorak modernis tersebut telah berdiri pada 1912. Lihat dalam Yudi Latif, *Intelelegensi Muslim dan Kuasa, Sejarah Intelelegensi Muslim Indonesia pada Abad Ke-20*. hlm. 179.

tertutupnya telah memutuskan untuk mencalonkan Sukarno sebagai presiden, apabila Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya.¹⁹

Pendirian Partai NU terjadi pada tanggal 30 Agustus 1952. Latar belakang pendirian tersebut, dikarenakan adanya perpecahan berkepanjangan di dalam internal partai Masyumi. Sebelum memutuskan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri, NU bersama-sama PSII, Perti dan sebuah organisasi Islam yang berpusat di Pare-Pare (Sulawesi Selatan) mendirikan liga muslim untuk menandingi Masyumi sebagai wadah kesatuan muslim Indonesia.²⁰ Marginalisasi kader-kader NU ketika di dalam partai Masyumi dengan hanya menempatkannya pada struktur dewan Syuro, yang peranannya hanya sebagai penasihat partai dengan tanpa mempunyai wewenang untuk memutuskan kebijakan partai, telah membuat NU memutuskan untuk berpisah dari partai kesatuan seluruh umat Islam Indonesia tersebut, padahal NU merupakan salah satu organisasi anggota partai Masyumi yang berperan besar dalam kesuksesan pendulangan suara partai Islam terbesar tersebut di wilayah-wilayah desa di pulau Jawa, pulau yang jumlah penduduknya merupakan terpadat dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia.

Keputusan NU tersebut jelas sangat merugikan Masyumi dan sebenarnya juga menyulitkan organisasi muslim tradisionalis ini,

¹⁹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, hlm. 49.

²⁰ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers. 1984), hlm. 67-68.

namun langkah tersebut telah berhasil membuat NU menjadi partai yang sangat di perhitungkan dalam perpolitikan nasional, dan dengan langkah tersebut NU mendapatkan jatahnya kembali untuk mendudukan kadernya pada posisi menteri agama, posisi menteri yang diklaimnya sebagai hak mutlak partai tradisionalis muslim tersebut.

Ideologi politik NU lebih didasarkan pada pemikiran keagamaannya, yang diambil dari kaidah fikih, yaitu, 'Menghindari kerugian harus lebih diutamakan dari mencari keuntungan' (*Dar-ul mafasid muqaddamun'ala jalbil mashalih*). Kaidah tersebut sering digunakan NU sebagai landasan atau sikap politiknya dalam menghadapi pergulatan politik nasional yang memaksanya untuk menghindari permasalahan politik yang lebih rumit dan dianggapnya akan merugikan kehidupan umat Islam Indonesia secara keseluruhan.²¹

Pada saat Sukarno ingin membubarkan partai-partai dan mengganti demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin, NU adalah salah satu partai yang menentang rencana tersebut. Kuatnya keinginan Sukarno untuk membubarkan sistem liberal serta mendapat dukungan solid dari militer membuat NU menjadi satu-satunya partai Islam yang mendukung dan terlibat dalam keberlangsungan pemerintahan demokrasi terpimpin. Tetapi pada masa menjelang kejatuhan Sukarno, NU adalah salah satu organisasi Islam yang terlibat banyak dalam

²¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, hlm. 253.

pemberantasan PKI, sebagaimana yang dilakukan organisasi Islam lain yang sebelumnya telah terlibat konflik dengan PKI.

3. Ideologi Nasionalisme dan PNI

Hampir seluruh gerakan yang ada di Nusantara pada masa sebelum kemerdekaan, telah menyandarkan pada spirit nasionalisme sebagai landasan gerakan dalam perjuangannya untuk mengusir penjajahan yang sedang terjadi. Nasionalisme yang dimaksud adalah mengacu pada faham yang mementingkan perbaikan dan kesejahteraan bangsanya.²² Nasionalisme telah membangkitkan kesadaran rakyat tentang arti penting identifikasi sebuah bangsa bagi perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Nasionalisme telah dianggap dapat mengembalikan harga diri yang hilang karena adanya kolonialisme dan imprealisme.

Keberadaan nasionalisme dalam sejarah pergerakan nasional dikarenakan adanya dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif; faktor objektif karena kondisi ekonomi, geografi, histori, dan lain-lain, sedangkan faktor subjektif berupa kemauan, sentimen, aspirasi, dan lain-lain.²³ Kedua faktor tersebut telah menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk melawan penjajahan Belanda yang telah berlangsung cukup lama. Dalam hal ini nasionalisme juga dapat diartikan telah berhasil mengalahkan ketidakadilan kolonialisme.

²² Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2001), hlm. 4.

²³ *Ibid*, hlm. 7.

Meskipun pada tahapan selanjutnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat berupaya menjadikan negara Indonesia merdeka menjalankan kehidupan bangsa sesuai dengan prinsip ideologi yang dianut dan dikembangkan, namun nasionalisme merupakan simbol yang cukup efektif selama masa pergerakan nasional untuk membangkitkan perlawanan rakyat pada penjajahan. Sehingga nasionalisme bisa dikatakan sebagai faham yang telah mampu mengintegrasikan seluruh kekuatan rakyat untuk mengusir penjajahan.

Dalam sejarah pergerakan nasional dan perpolitikan Indonesia, perkembangan nasionalisme sendiri telah mengalami perubahan makna bagi kepentingan kelompok perjuangan tertentu. Faham tersebut diklaim sebagai identifikasi gerakan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melepaskan diri dari ikatan agama tertentu. Identifikasi nasionalisme dengan agama tertentu dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan untuk menyatukan masyarakat beragam, yang sebenarnya sama-sama merasakan pahitnya penjajahan bangsa asing. PNI sebagai salah satu gerakan yang sama-sama berjuang melawan penjajahan telah memonopoli nasionalisme sebagai ideologi yang identik dengan kelompoknya.

Identifikasi nasionalisme yang dianut PNI adalah mengikuti tren sekuler di dunia Barat, yang meletakkan agama pada batasan kepercayaan dan ritual individu saja. Kaum Nasionalis tersebut mengidealkan negara bangsa Indonesia mengambil inspirasi dari kejayaan kerajaan-kerajaan

Indonesia sebelum masa pra Islam seperti Sriwijaya dan Majapahit, dalam hal ini nasionalisme digambarkan sebagai gerakan yang mampu mengantarkan Indonesia memperoleh kejayaan baru seperti kecermelangan dua kerajaan Indonesia pada masa lalu. Tujuannya adalah kemerdekaan bagi seluruh rakyat pribumi di wilayah kepulauan Indonesia tanpa memperdulikan identitas etnis, adat istiadat dan agama.

Pada masa sebelum kemerdekaan, PNI telah mampu menggeser Sarikat Islam sebagai gerakan dominan pemersatu sebelumnya. Perjuangan kaum pengusung ideologi nasionalisme tersebut tidak membatasi pada upaya kemerdekaan Indonesia saja, tetapi juga menyatakan simpatinya kepada gerakan-gerakan kemerdekaan yang ada di negara lain. Cita-cita gerakan ini adalah Indonesia merdeka dengan usaha sendiri tanpa harus minta bantuan gerakan Panislamisme yang sedang berkembang di Asia dan menunggu bantuan negara sosialis Uni-Soviet.²⁴

Ideologi partai ini seperti yang diungkapkan Sukarno, merupakan ide lanjutan dari yang dikembangkan Indische partai yang didirikan oleh Douwes Dekker pada tahun 1912, yaitu penekanan terhadap pentingnya mempersatukan semua corak opini nasionalis dalam upaya mencapai kemerdekaan politik. PNI yang mengklaim sebagai partai nasionalis berupaya memperjuangkan kemerdekaan dikaitkan dengan persepsi-persepsi yang tidak begitu tepat mengenai perubahan sosial yang akan

²⁴ Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim, Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, terj. Ruslani dan Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 65-72.

menyertainya, dan yang pada waktunya akan nanti akan melahirkan suatu republik yang merdeka, adil dan makmur. Tugas partai dimaknai untuk mengerakan kekuatan rakyat dalam rangka melakukan tekanan yang terus-menerus terhadap pemerintahan kolonial.

Nasionalisme juga diletakan Sukarno sebagai sila pertama dalam pancasila dan menempatkan sila-sila lain dalam urutan selanjutnya, karena berdasarkan keyakinan bahwa nasionalisme harus menjadi fondasi negara yang meliputi seluruh kepulauan Nusantara. Sebagai pengagas pancasila, Sukarno memandang bahwa nasionalisme harus diletakkan sebagai tulang punggung kesatuan dan integritas bangsa Indonesia. Ia mendefinisikan nasionalisme bukan hanya sebagai keyakinan dan kesadaran rakyat yang disatukan ke dalam satu kelompok dan bangsa, namun juga sebagai kesatuan rakyat dan tanah airnya.²⁵

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, PNI ingin dijadikan Sukarno sebagai partai negara yang dapat mengawal revolusi bangsa, yang sedang ia canangkan, namun rencana itu gagal karena berbagai kelompok kepentingan telah mendirikan partai yang mengusung ideologi masing-masing dan menginginkan adanya pemilu yang melibatkan banyak partai. Dalam perjalanan kepemimpinan Sukarno, PNI meskipun secara resmi bukanlah partai pemerintah, namun dalam kenyataannya partai nasionalis terbesar tersebut merupakan kepanjangan dari aspirasi Sukarno melalui

²⁵ Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama, Respons dan Penerimaan Umat Islam Terhadap Pancasila*, hlm. 29.

jalur parlemen, dan selama kepemimpinan tersebut berakhir PNI merupakan pendukung utama pemerintahan.

B. Pemikiran Sosio-Historis Dalam Polemik Bentuk Negara

Pemikiran tentang bentuk Negara Indonesia sudah terlintas dibenak tokoh-tokoh gerakan nasional sejak masa kebangkitan nasional, dimana kesadaran untuk membangun sebuah Negara bagi sebuah bangsa Indonesia telah mulai dicetuskan bagi arah perjuangan yang sedang diupayakan. Tetapi, polemik bentuk negara semakin mengemuka ketika menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kekosongan pemerintahan yang terjadi sejak hengkangnya Jepang akibat serangan sekutu, membuat tokoh nasional saling berlomba menawarkan konsep Negara Indonesia, yang sesuai dengan pemikirannya. Polemik tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama membentuk pemerintahan republik sebagai bentuk kepemimpinan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara dan untuk sementara menerima Pancasila sebagai dasar negara, meskipun masih ada persoalan yang belum terselesaikan terkait landasan filosofis dan ideologi negara.

Selama kepemimpinan Sukarno, polemik bentuk negara terus mengemuka dan cenderung mengganggu bentuk negara yang telah disepakati pada masa proklamasi kemerdekaan. Di samping adanya upaya Belanda yang ingin menjajah kembali dengan menawarkan bentuk negara Federal sebagai bentuk pemerintahan yang memungkinkannya untuk menguasai Indonesia, upaya berbagai partai yang ingin mengganti bentuk negara merupakan salah satu polemik yang terus berkembang. Di sisi lain, upaya

berbagai gerakan dan kekecewaan sebagian anggota parlemen yang melakukan kudeta dan pemberontakan merupakan salah satu bentuk upaya mereka untuk mengganti bentuk negara yang dianggapnya tidak sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat.

1. Negara Sosialisme

Sejak memproklamirkan kemerdekaannya, Indonesia belum pernah secara resmi menggunakan sosialisme sebagai landasan negara, seperti layaknya negara Sosialis China, Kuba ataupun Uni-Soviet. Meskipun unsur-unsur sosialisme tetaplah dominan dalam pendirian Negara republik Indonesia, dan merupakan sistem yang diklaim sebagai landasan akhir dari pemerintahan Sukarno, namun selama keberlangsungan negara Indonesia, sosialisme bukanlah ideologi negara yang gunakan dalam sistem pemerintahan.

Memang masa kelahiran negara republik Indonesia bertepatan dengan panasnya konstalasi politik dunia yang melibatkan dua ideologi besar untuk berperang memperebutkan pengaruhnya, sehingga kekuatan-kekuatan kapitalisme dan sosialisme tetaplah memainkan peran dalam mewarnai pergolakan politik nasional, namun Indonesia belum pernah jatuh ke dalam pemihakan yang nyata kepada salah satu negara dari dua poros dunia tersebut, bahkan Indonesia berupaya menjadi negara yang memprakarsai berdirinya gerakan non-blok dengan mengajak negara-negara lain. Gerakan non-blok bertujuan menyatukan berbagai negara

untuk bekerja sama dan tidak memihak pada dua poros dunia, pusat kekuatan kapitalisme dan kekuatan komunisme.

Dalam penjelasan tentang negara sosialisme ini, penulis akan memfokuskan tentang upaya beberapa gerakan yang ingin menjadikan negara Indonesia yang berlandaskan pada ideologi sosialisme sebagai ideologi resmi negara. Begitu banyak peristiwa yang dilakukan dua gerakan berbasis ideologi sosialisme yang ingin merubah negara Indonesia menjadi negara sosialisme. Meskipun gerakan dari kedua kelompok ini hanya berupa kudeta dan pemberontakan yang tidak sampai merubah bentuk negara Indonesia, namun kedua gerakan ini dianggap merupakan salah satu bentuk polemik bentuk negara yang mewarnai konstalasi politik nasional, di samping upaya partai yang berideologi Sosialis memperjuangkan bentuk negara dengan berdasarkan ideologi sosialisme yang terjadi di gedung parlemen.

a. Kudeta Tan Malaka

Upaya pengambil alihan kepemimpinan nasional dari Sukarno-Hatta oleh Tan Malaka pada masa revolusi kemerdekaan,²⁶ merupakan upaya tokoh komunis nasionalis tersebut untuk menjadikan Negara Indonesia yang berlandaskan Sosialisme. Kesimpulan ini didasarkan pada latar belakang Tan Malaka sebagai tokoh komunis, serta melihat aksi-aksinya dalam menawarkan program-programnya bagi

²⁶ Pada awal juli 1946, Tan malaka beserta pengikutnya melakukan kudeta yang tidak berhasil. Lihat dalam J. D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Syahrir*, hlm.199.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Memang Tan Malaka bukanlah tokoh komunis yang mengacu lagi pada kekuatan Sosialisme dunia seperti Soviet dan China, namun jiwa Tan Malaka tetaplah jiwa seorang komunis yang sangat anti untuk bekerja sama dengan kekuatan kapitalisme dalam bentuk apapun, melakukan kerja sama dengan kekuatan tersebut dianggapnya sebagai memberi kesempatan bentuk-bentuk model Imprealisme baru untuk menjajah bangsa lemah seperti bangsa Indonesia.

Meskipun pada akhirnya kudeta gagal karena tidak mendapat dukungan yang diharapkan, dan peristiwa tersebut juga mengakibatkan Tan Malaka di masukan penjara bersama kawan-kawannya seperjuangannya. Dalam perkembangannya, Tan Malaka terus melanjutkan perjuangannya secara radikal seperti saat-saat sebelumnya, tuntutannya pun tetap sama yaitu merdeka seratus persen bagi negara Indonesia dan mengambil alih kepemimpinan Sukarno. Gerakan Tan Malaka akhirnya dapat dihentikan dengan terbunuhnya ia dalam baku tembak dengan tentara nasional Indonesia di Kediri. Kematiannya merupakan upaya pemerintah untuk meredam perjuangan konfrontasi langsung dengan Belanda yang dianggap dapat membahayakan perjuangan jalur diplomasi yang sedang berlangsung.

b. Pemberontakan PKI

Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan PKI selama ini adalah bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia berlandaskan

ideologi Sosialisme komunis, yang mengacuh pada kekuatan blok komunis dunia, Uni-Soviet. Sebelum Indonesia merdeka, PKI telah melakukan revolusi bersenjata pada 1926-1927 untuk menjadikan Negara Indonesia merdeka yang berlandaskan Sosialisme komunis, namun upaya itu gagal karena masih kuatnya dominasi Belanda untuk melumpuhkan gerakan rakyat seperti revolusi bersenjata yang dilakukan PKI.

Pemberontakan PKI yang dilakukan pada masa revolusi kemerdekaan, merupakan upaya tokoh-tokoh lama PKI beserta Amir Syarifudin yang kecewa terhadap sikap pihak Indonesia dalam perundingan Renville, yang sebenarnya juga melibatkan Amir Syarifidun dalam perundingan tersebut. Pemberontakan PKI yang dipusatkan di kota Madiun tersebut diklaimnya sebagai bentuk pemerintahan militer yang mengacuh pada Uni-Soviet, sebagai kekuatan utama blok komunisme dunia. Pemberontakan di Madiun tersebut telah menewaskan para tokoh PKI yang selama ini mengomandoi gerakan PKI sejak tahun 1926.

Sebagai kekuatan yang dikomandoi oleh blok komunis dunia, PKI selalu berupaya menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara komunis. Keberhasilan PKI membersihkan citranya setelah pemberontakan Madiun, membuatnya menjadi partai yang terus berkembang pesat dan mengalahkan partai-partai lain yang sebelumnya cukup dominan. Keberhasilan tersebut dimungkinkan juga

karena keahlian PKI dalam menggunakan sosok Sukarno untuk menarik masa, sang proklmataor tersebut diakuinya sebagai presiden yang mempunyai kesamaan visi perjuangan dalam mewujudkan kesuksesan revolusi di Indonesia.

Dukungan Sukarno pada kiprah PKI, telah membuat partai komunis tersebut berupaya kembali melakukan perebutan kekuasaan. upaya pemberontakan ketiga ini sebenarnya lebih matang dan terkonsep, karena PKI merupakan mitra presiden yang sangat diandalkan. Namun kompetitor PKI, militer merupakan pengawal pemerintahan demokrasi terpimpin, sehingga dalam upaya menguasai pemerintahan PKI diharuskan untuk menyingkirkan militer, terutama angkatan darat yang cukup dominan dalam pemerintahan. Disisi lain, militer pada tahun 1950-an telah mendapatkan pelatihan dari Amerika, dan mereka cenderung anti komunis.

Peristiwa Gerakan 30 September 1966(G30SPKI) yang dilakukan PKI dengan menculik dan menyiksa secara kejam para jenderal angkatan darat karena dianggap sebagai penghalang revolusi yang sedang berlangsung, telah membuat PKI menjadi *common enemy* nomor satu masyarakat Indonesia. Perilaku kejam tersebut mampu menggerakkan seluruh rakyat untuk menuntut pembubaran PKI, dan kuatnya tuntutan-tuntutan rakyat yang terus berlangsung telah dapat mengakhiri kiprah partai komunis dalam perpolitikan Indonesia.

2. Negara Federal

Pembentukan negara federal dalam perjalanan kepemimpinan Sukarno, merupakan Inisiatif Belanda yang sedang berupaya mendapatkan kembali wilayah jajahannya. Hengkangnya kekuatan Jepang akibat serangan sekutu, telah memberi kesempatan bagi bangsa Eropa tersebut untuk kembali menguasai Indonesia. Dengan memanfaatkan masih lemahnya koordinasi pemerintahan Sukarno-Hatta yang baru terbentuk, Belanda melakukan agresi militer untuk menguasai seluruh bekas wilayah jajahannya, apalagi di sebagian wilayah Timur Indonesia, seperti Maluku dan Nusa Tengara Timur adalah wilayah zending para misionaris dari Eropa pada masa penjajahan, sehingga telah terjalin ikatan emosional antara Belanda dan para penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Pemerintahan RIS diharuskan menanggung hutang Belanda 6,5 gulden, jumlah yang cukup besar bagi negara baru dengan kas cekak. Jumlah tangungan pemerintahan tersebut sama dengan biaya ongkos perang Belanda untuk menjajah Indonesia selama ini. Penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda juga tidak disertai dengan penyerahan seluruh bekas wilayah jajahannya, karena Belanda belum mau melepaskan Irian Barat sebagai bagian wilayah Indonesia.

Republik Indonesia serikat (RIS) adalah hasil dari perjuangan diplomasi bertahun-tahun para pemimpin Indonesia dengan pihak Belanda. Keberadaan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus dalam struktur pemerintahan RIS tidak berbeda jauh dengan negara-

negara federal hasil rekayasa Belanda. Pemerintahan RIS dipimpin oleh Sukarno sebagai presiden hasil dari sidang DPR dan MPR RIS, dan roda pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang diduduki Hatta.²⁷

Selama menjadi perdana menteri RIS, Hatta berupaya untuk membangun pemerintahan Indonesia yang belum sempat terselesaikan sebelumnya, karena disibukkan dengan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Pengorganisasian militer menjadi fokus awal untuk pemberahan keamanan negara untuk menggantikan peran militer Belanda selama ini. Disusul kemudian pemberahan administrasi dan kepegawaian negara, yang pada masa tersebut mengalami kendala dengan masih minimnya tenaga ahli yang dapat mengurus persoalan kenegaraan pada masa modern.

Keberlangsungan pemerintahan RIS hanya bertahan setahun, karena selama pemerintahan RIS mayoritas negara federal menghendaki untuk bersatu dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang pernah dicanangkan pada masa proklamasi kemerdekaan. Di samping itu, pada masa tersebut, Sukarno rajin berkampanye mensosialisasikan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.²⁸

3. Negara Islam

Kemerdekaan yang telah diraih dari tangan penjajah membuat kalangan muslim yang selama ini memperjuangkannya berkeinginan untuk

²⁷ Darmawan MM, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 339-340.

²⁸ *Ibid*, hlm. 349-354.

mendirikan negara republik Indonesia menjadi republik Islam seperti kaum muslim dibelahan dunia lainnya. Kalau selama ini, perjuangan didasarkan untuk melawan dan mengusir penjajah, maka ketika kemerdekaan telah diraih, perjuangan selanjutnya adalah untuk menjadikan negara yang mayoritas penduduknya muslim tersebut untuk menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam.

Selama ini umat Islam adalah umat yang paling dirugikan oleh adanya kolonialisme Belanda. Selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun Belanda menjajah Nusantara, selama itu pula umat Islam dilarang menjalankan kehidupannya secara Islami disebabkan karena adanya intervensi pemerintah kolonial dalam kehidupan beragama mereka. Umat Islam hanya dibolehkan menjalankan Ibadah yang tidak mengganggu jalannya kolonialisme, sehingga umat Islam hanya bisa menjadi sapi perahan penjajah tanpa bisa berkembang dan menentukan kehidupannya sendiri.

Anugerah Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia harus disukuri umat Islam dengan menjalankan kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhan melalui negara Islam. Umat Islam harus menjadikan negara republik Indonesia sebagai republik Islam, sehingga ada keleluasaan bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya secara Islami, maka menjadi kewajiban wakil-wakil Islam untuk memperjuangkan berdirinya negara Islam bagi bangsa Indonesia.

Negara Islam adalah negara yang melandaskan kehidupan pemimpin dan rakyatnya pada wahyu Allah yang telah tertuang dalam Al-Qur'an serta as-Sunah yang terimplimentasi melalui syariah Islam yang telah dipraktikkan nabi dan para sahabat dan dilanjutkan para khalifah Islam serta para ulama. Syariah Islam adalah landasan hidup umat Islam yang komprehensif dan mengatur segala persoalan secara detail sehingga umat Islam tidak memerlukan aturan dan ideologi lain dalam menyelesaikan segala persoalannya.

Negara Islam tidaklah bersifat teokrasi, karena dalam agama Islam tidak mengenal adanya istilah kependetaan. Islam mengajarkan umatnya untuk mematuhi pemimpinnya yang melaksanakan ajaran Islam. Ayat Al-Qur'an selalu menganjurkan seorang muslim untuk taat pada perintah Tuhan dan rasulnya serta menaati pemimpinnya yang mematuhi perintah Tuhan. Sehingga klaim bahwa negara Islam bersifat teokrasi seperti layaknya negara Vatikan tidak dapat dibenarkan dalam sejarahnya.

Argumen-argumen tersebut sering dijadikan landasan para tokoh muslim Indonesia untuk perjuangan membentuk negara Islam menggantikan negara sekuler yang dianut sejak proklamasi kemerdekaan. Dalam prakteknya perjuangan pendirian negara Islam dilakukan para tokoh muslim melalui jalur konstitusi dalam gedung parlemen, bagi sebagian tokoh muslim lain melalui pemberontakan dengan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia.

Bahkan Natsir, sebagai tokoh terdepan Masyumi mengusulkan pembentukan negara Indonesia yang berdasarkan syariat Islam untuk menggantikan Pancasila yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepribadian mayoritas rakyat Indonesia, Pancasila baginya hanyalah yang sama untuk semua opini yang berbeda dan sangat tidak jelas keberadaannya, karena Pancasila merupakan ideologi negara yang multi tafsir, yang tentunya sangat menyesuaikan dengan pandangan masing-masing individu yang sangat beragam, dan terkadang Pancasila juga ditafsirkan secara bertolak belakang oleh orang-orang yang sebenarnya berpandangan komunis.²⁹

Bisa dikatakan selama masa kepemimpinan Sukarno para wakil muslim di parlemen berupaya memperjuangkan bentuk negara Indonesia yang berlandaskan pada syariat Islam layaknya keberhasilan mayoritas kaum muslim di negara-negara Islam lain, dan keinginan itu terus berlangsung lama dan dapat mereda setelah proses panjang transformasi dalam diri generasi muda Islam dan sebagian besar merupakan keturunan aktifis muslim pada masa awal pembentukan negara Indonesia. perubahan mendasar pemikiran tentang Islam dapat terwujud dengan timbulnya pemikiran liberalisme yang dikembangkan generasi intelektual muslim tahun 70-an seperti Nurcholis Majid, Dawam Raharjo dan Gus Dur. Sedangkan kelanjutan bentuk pemberontakan, meskipun tidak musnah

²⁹ Argumen Natsir tersebut dinyatakan menjelang pembubaran masyumi oleh presiden Sukarno. Lihat dalam Jeanne S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, hlm. 183-185.

namun keberadaannya perlahaan tapi pasti dengan sendirinya mulai memudar.

4. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang menyatukan segala elemen bangsa Indonesia dalam wadah persatuan nasional tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan suku yang didasarkan pada semangat kebersamaan dalam membangun bangsa agar tercapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Sehingga di dalam negara kesatuan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbeda tetapi bersatu dalam sebuah negara yang berdaulat.

Negara Kesatuan merupakan negara yang diimajinasikan kaum nasionalis sekuler pada masa kebangkitan nasional, bagi mereka negara merupakan titik pusat perjuangan, dan dengan kepemimpinan nasionalis akan tercapai kemerdekaan. bentuk negara kesatuan bagi bangsa Indonesia merupakan alat untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan, walaupun program-program yang tepat harus dilaksanakan dalam situasi baru itu harus dirumuskan pada kesempatan kemudian. Jadi negara tidak dipandang sebagai suatu bentuk negara yang dapat mendamaikan konflik-konflik di antara berbagai kepentingan atau golongan yang dominan, melainkan sebagai alat suatu konsensus politik.³⁰

Proklamasi kemerdekaan telah menandai keberlangsungan bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara yang digunakan dalam

³⁰ Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim*, hlm.

pemerintahan nasional, namun keberadaan Belanda yang berupaya menjajah kembali Indonesia dengan memaksakan bentuk negara federal sebagai bentuk negara yang digunakan dalam penyerahan kedaulatan kepada kepemimpinan nasional membuat negara kesatuan tidak dapat digunakan secara semestinya dalam masa revolusi kemerdekaan.

Pemerintahan RIS yang menggunakan sistem parlementer, menjadikan bentuk negara kesatuan dapat melanjutkan sistem pemerintahan selanjutnya secara parlementer sebagaimana pada masa pemerintahan RIS, tetapi pengembalian ke bentuk negara kesatuan mengharuskan bagi kepemimpinan nasional untuk membubarkan negara-negara bagian yang ada pada masa sistem negara federal tersebut.³¹ Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk final negara Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno yang juga dilanjutkan para presiden sesudahnya hingga saat ini.

³¹Darmawan MM, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 352-354.

BAB IV

NILAI-NILAI ISLAM DALAM REVOLUSI INDONESIA

A. Nilai-Nilai Islam Dalam Revolusi Indonesia Pada Masa Kepemimpinan Sukarno

Hampir dalam setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat muslim, Islam telah memberikan kekuatan pembebasan yang melepaskan masyarakat dari bentuk ketidakadilan dan bentuk kejahiliyaan yang terjadi di lingkungannya. Islam telah memberikan spirit perlawanan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh kekuatan mapan yang telah menyengsarakan kehidupan masyarakat secara luas.¹ Dalam sejarahnya, Islam telah memberikan peran dan sumbangsih yang sangat penting untuk menyebarkan keutamaan suatu tanggung jawab sebagai sesuatu yang letaknya di atas hak, dan hal itu sesuai dengan visi Islam yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan (*theomorphic*) atau makhluk dengan unsur ilahiah. Islam juga berperan sebagai kekuatan utama untuk menentang adanya desakralisasi, baik terhadap manusia maupun alam.²

¹ Dalam konteks zamannya, Islam pada dasarnya adalah gerakan spiritual, moral, budaya, serta sistem ekonomi alternatif bagi budaya arab yang pada masa itu mengalami pembusukan dan proses dehumanisasi. Islam adalah pembebas bagi kaum tertindas, pembebas manusia dari segala bentuk alienasi dan Islam adalah gerakan pembebas masyarakat arab pada masa itu dari penjajahan kekuatan global Romawi di Barat dan Bizantium di Timur. Lihat Mansur Fakih, *Islam Sebagai Alternatif* didalam pengantar Eko Prasetyo, *Islam Kiri* (Yogyakarta:Insist Press, 2002). hlm. iii.

² Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm.366.

Dengan diutusnya para nabi ke dunia tidak lain adalah bertujuan untuk membebaskan umat manusia dari ketertindasan yang membelenggunya,³ dan hal tersebut juga merupakan bentuk campur tangan Tuhan terhadap kehidupan atau pertolongannya bagi umat manusia. Karena pada dasarnya suatu perbudakan adalah musuh utama bagi kehidupan sosial umat manusia yang harus diperangi sampai kapan pun.⁴

Perjuangan Rasulullah SAW dan para nabi lain dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kerusakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya adalah inspirasi dan suri tauladan bagi setiap umatnya untuk melakukan perjuangan yang sama.⁵ Sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat Muhammad untuk menyampaikan kebenaran sebagai petunjuk yang harus dijalankan di manapun keberadaan mereka, karena pada dasarnya setiap muslim adalah penyampai risalah kebenaran, meskipun ia hanya mengetahui sedikit dari kebenaran tersebut.

Meskipun Islam adalah ajaran tentang kehidupan yang menyangkut semua aspek, namun pada dasarnya seluruh nilai-nilai Islam yang terkandung dalam al-Qur'an bersifat normatif, dan perlu kajian serius dalam implementasinya. Al-Qur'an sebagai kitab suci hanya memberikan landasan dasar bagi kehidupan, dan tidak memberikan penjelasan detail bagi setiap

³ Asghar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agus Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 4.

⁴ Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial*, hlm. 188-189.

⁵ Tujuan setiap nabi diturunkan ke dunia adalah untuk menyatakan kebenaran dan menegakkan sebuah komunitas berlandaskan kebenaran. Lihat dalam Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, terj. E. Setiyawati Al Khattab (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 246.

permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Menurut Amin Abdullah, nilai-nilai ajaran fundamental al-Qur'an bersifat universal-transendental-transkultural, yang dalam memahami kitab suci tersebut memerlukan suatu kerangka pemahaman hermeuneutis yang dapat menghasilkan dialektika aktif antara teks dengan konteks, dan dengan proses tersebut akan ditemukan penafsiran dan pemahaman yang saling memperteguh dan memperkuat antara tataran ideal dan tataran praksisnya.⁶ Dalam konteks kehidupan berbangsa pada masyarakat Indonesia, al-Qur'an juga harus dibaca dengan tidak menafikan kebhinekaan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah masalah sejarah politik kekuasaan yang telah terjadi di Indonesia.

Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia yang banyak bersinggungan dengan Islam, membuat kajian sejarah Indonesia memang tidak bisa melepaskan diri dari kajian peranan Islam dalam mewarnai pergulatan kehidupan bangsa Indonesia sampai kapanpun. Melihat kepemimpinan Sukarno dan keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam merupakan upaya penulis untuk mengkaji masa kepemimpinan tersebut dengan menggunakan Islam sebagai sistem nilai objektif yang dapat memberi makna dan mendeskripsikan sebuah kekuasaan sebagai realitas masa lalu yang bermanfaat bagi masa kini, dan tentunya dapat menjadikan Islam sebagai media transformasi bagi perubahan dan kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum.

⁶ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, hlm. 267-271.

Dalam bab empat ini, akan dikaji nilai-nilai Islam dalam revolusi Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno. Penulis akan menggunakan nilai *as-Syūra* (Musyawarah), nilai *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), nilai *al-'Adālah* (keadilan), nilai *al-Hurriyyah* (kebebasan), dan nilai *al-Amānat* (kejujuran dan tanggungjawab) sebagai nilai Islam yang dijadikan analisa dalam membaca sejarah masa kepemimpinan tersebut. Dilanjutkan dengan refleksi penulis, yang menganalisa keadaan bangsa Indonesia pada masa kini dan relevansinya dengan nilai-nilai Islam, yang juga dijadikan acuan dalam menilai masa kepemimpinan sang proklamator tersebut.

1. Nilai-Nilai Musyawarah dalam Masa Kepemimpinan Sukarno

Dalam kehidupan bersama, musyawarah merupakan nilai utama yang harus dijunjung dan ditegakkan, apalagi dalam pemerintahan sebuah negara. Terlaksananya musyawarah menunjukkan adanya indikasi kuat keberhasilan sebuah kepemimpinan dalam membangun kehidupan kenegaraan dengan baik. Negara sebagai wujud kepemimpinan nasional yang didasarkan pada kedaulatan seluruh warganya, seharusnya memberi keleluasaan bagi setiap warga negaranya untuk dapat mengartikulasikan setiap potensi mereka agar dapat berkembang dan berguna bagi kehidupan bangsanya. Adanya prinsip musyawarah dalam sebuah negara akan sangat membantu negara dalam menyerap aspirasi setiap warganya, karena

dengan terlaksananya musyawarah, maka dengan sendirinya negara menghargai dinamika dan aspirasi dalam kehidupan warganya.

Dalam sejarah perkembangan perpolitikan bangsa-bangsa selama ini, sistem demokrasi telah menempati posisi istimewa dibandingkan dengan sistem-sistem lain yang juga dipakai dalam sistem ketatanegaraan yang ada. Perkembangan zaman modern menunjukkan, bahwa demokrasi telah dianggap dan diyakini di hampir seluruh peradaban manusia yang ada, terutama peradaban Barat sebagai sistem yang dapat memberikan cara kehidupan negara yang sangat baik dan sangat ideal bagi kehidupan sosial manusia.⁷ Bagi para pengusungnya, demokrasi merupakan sistem yang terus berkembang dan sangat memberi keleluasaan untuk melakukan adaptasi yang menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Meskipun dalam perkembangannya kemudian demokrasi juga diklaim bagi hampir seluruh pemerintahan negara di dunia, namun tolak ukur umum negara demokrasi adalah negara-negara Eropa barat dan Amerika Serikat, sebagai negara yang mengklaim melahirkan sistem demokrasi dan yang terus mengembangkannya. Memang ada juga sebagian negara yang sebenarnya jelas-jelas mempraktekkan sistem otoritarianisme namun mengklaim mempraktekkan demokrasi, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memang telah menjadi primadona bagi sistem kenegaraan dalam peradaban manusia masa kini.

⁷ Dari sisi normatif, demokrasi adalah tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai seluruh masyarakat dalam sebuah Negara. Lihat dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 29.

Dalam dunia Islam sendiri, termasuk di dalamnya negara Republik Indonesia, tidak bisa dinafikan masih banyak perdebatan yang terus berlangsung di kalangan umat Islam mengenai apakah demokrasi berkesesuaian dengan Islam atau malah sebaliknya, sangat bertentangan dengan sistem yang sangat dijunjung hampir seluruh negara di dunia tersebut. Pengalaman umat Islam Indonesia selama ini menunjukkan, perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara, yang di dalamnya juga menyangkut demokrasi, perdebatannya tidak pernah berakhir, bahkan hal tersebut sudah mengemuka semenjak masa kebangkitan nasional. Sengitnya perdebatan antara Sukarno dan Natsir mengenai hubungan Islam dan negara yang berlangsung semenjak sebelum proklamasi kemerdekaan, adalah sejarah yang tidak terbantahkan keberadaannya.

Perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara memang akan terus berlangsung sampai kapanpun, dan mungkin akan terus terjadi di manapun sepanjang sejarah umat Islam di dunia, terutama apabila sebuah komunitas muslim menjadi kelompok mayoritas dalam suatu negara. Meskipun realitas di Indonesia pada saat ini perdebatan di parlemen mengenai hubungan Islam dan negara tidak semarak pada masa sebelumnya, seperti layaknya pada masa demokrasi parlementer, namun tidak dipungkiri, realitas di masyarakat menunjukkan, bahwa perdebatan mengenai tema tersebut tetaplah terjadi, bahkan bisa dikategorikan, tema tersebut tetap akan terus menjadi tema yang aktual dalam masyarakat muslim Indonesia, terutama di kalangan mayoritas aktifis muslim.

Pada dasarnya kajian ataupun perdebatan tentang hubungan Islam dan negara adalah hal yang sangat positif dalam khazanah keislaman, namun adanya kecenderungan beberapa kelompok Islam yang ada di Indonesia untuk memaksakan pemahaman bahwa umat Islam berkewajiban mendirikan negara Islam yang fikih hukum oriented menjadikan kajian keislaman menjadi macet dan menjadikan umat Islam terpaku pada kajian Islam yang sangat politis. Kajian keislaman akan lebih berkembang dan kaya, apabila kajian membuka diri pada dinamika perpolitikan internasional yang tentunya sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang ditawarkan Islam. kajian seperti apa yang dapat disumbangkan umat Islam dengan sistem demokrasi yang ada, adalah sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan demokrasi.

Perjalanan negara Indonesia selama ini yang telah berupaya membangun sistem demokrasinya, adalah fenomena yang sangat menarik bagi perkembangan sejarah demokrasi secara keseluruhan, apalagi jika dikaitkan dengan konsep Syura dalam Islam. Memang kenyataan sejarah negara Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno tidaklah ideal untuk menjadi rujukan bagi contoh sebuah praktek demokrasi yang baik, tetapi upaya Indonesia membangun demokrasi pada masa tersebut adalah perjuangan panjang Indonesia untuk mencari demokrasinya yang dalam prakteknya banyak berbenturan dengan kenyataan yang sudah tidak ditemui pada negara-negara yang menjadi kiblat demokrasinya.

Sejarah negara Indonesia yang dimulai dengan keberlangsungan Proklamasi kemerdekaan, yang dalam kenyataannya telah memungkinkan rakyat untuk membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang dapat memperjuangkan aspirasinya. Pengalaman hidup dalam pemerintahan bangsa asing yang sangat mengekang, membuat rakyat berusaha membentuk kelompok-kelompok yang dapat memperjuangkan aspirasinya. Pada awal pendirian kelompok-kelompok kepentingan atau partai tidak lain bertujuan untuk lebih memperhatikan pada persoalan kegiatan yang bersifat sosial kultural dan jauh dari tujuan-tujuan politik kekuasaan.⁸ Fokus pada kegiatan yang bersifat sosial kultural menunjukkan juga sebagai bentuk tanggung jawab mereka pada kesinambungan proses sosialisasi makna kemerdekaan bagi kelanjutan kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya.

Keberadaan kekuatan-kekuatan asing yang berusaha melanjutkan penjajahannya pada masa revolusi kemerdekaan, membuat sebagian kelompok gerakan berupaya mengambil langkah-langkah frontal dan cenderung menafikan strategi perjuangan bersama. Rencana pengambilalihan kepemimpinan nasional oleh Tan Malaka dan pendukungnya bisa dikategorikan sebagai sebuah upaya salah satu komponen bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan mengindahkan bentuk perjuangan diplomasi yang syarat dengan nilai-nilai musyawarah. Perjuangan yang berupaya merundingkan penyerahan

⁸ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, hlm. 64.

kekuasaan terhadap para pemimpin nasional tersebut enggan dilakukan kaum kiri tersebut karena dianggap sebagai bentuk perjuangan yang dapat memberikan kesempatan penjajah merampas kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Dapat juga dikatakan bahwa usaha Tan Malaka tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaannya pada kepemimpinan Sukarno yang dianggapnya sebagai kepemimpinan yang dikendalikan oleh kolaborator Jepang, dan menurutnya kepemimpinan nasional tersebut tidak akan mampu membawa bangsa untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia yang terlepas dari adanya segala bentuk cengkeraman penjajahan kembali.

Adanya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan merupakan bentuk ekspresi kekecewaan sebagian kecil komponen bangsa yang tidak sabar dengan proses diplomasi yang sedang berlangsung, dan juga karena masih adanya tekanan Belanda yang sangat menyulitkan posisi Pemerintah Indonesia pada masa itu. Sebenarnya hampir semua komponen gerakan yang ada pada masa revolusi kemerdekaan kecewa dengan perjuangan diplomasi yang hasilnya sering dianggap sangat merugikan dan mengancam keberadaan negara Indonesia,⁹ namun hanya PKI yang menggunakan pemberontakan untuk menunjukkan kekecewaannya pada kepemimpinan Sukarno. Keberadaan pemberontakan tersebut juga telah menambah permasalahan dan

⁹ Darmawan M. M. *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 307-312.

kerumitan bangsa, serta mengakibatkan penderitaan bangsa yang sedang berjuang keras mempertahankan kemerdekaan.¹⁰

Terbunuhnya tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun dalam upaya penanggulangannya, dan juga terbunuhnya Tan Malaka dalam peristiwa Kediri merupakan wajah kelam perjalanan revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan pada kenyataannya terpaksa harus mengorbankan anak bangsa sendiri yang sedang sama-sama berjuang mempertahankan dan mewujudkan sebuah kemerdekaan Indonesia yang bisa memberikan kemerdekaan dan kedaulatan seluruh anak bangsa untuk dapat mengatur keberlangsungan pemerintahan bangsa sendiri yang terlepas dari adanya bayang-bayang penjajahan dari bangsa lain.

Terjadinya pemindahan pusat pemerintahan negara Indonesia dari kota Jakarta ke kota Yogyakarta pada masa revolusi kemerdekaan merupakan bentuk strategi yang diambil untuk mempertahankan kepemimpinan nasional dari pengambilalihan kekuasaan oleh Belanda. Tentara belanda yang melakukan agresi memang sangat membahayakan keberlangsungan negara Indonesia yang memang masih seumur jagung. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertumpuh pada perlawanan secara fisik yang memang sangat terbatas dengan kemampuan peralatan perang dan pertahanan negara yang masih

¹⁰ Pemberontakan di Madiun yang dilakukan PKI telah membuat trauma yang mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan tentara dan umat Islam trauma tersebut dapat dilihat dari sikap mereka terhadap sepak terjang PKI pada masa-masa selanjutnya setelah peristiwa pemberontakan tersebut, bahkan mungkin trauma tersebut terus menghingapi hingga saat ini. Lihat dalam Robert W. Hefner, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta:Lkis. 2000), hlm. 99.

minim, dan jalur diplomasi dengan pihak Belanda merupakan salah satu bentuk perjuangan terbaik yang dapat dilakukan pada masa tersebut.

Meskipun sebelumnya sempat berdiri banyak negara federal yang diprakarsai oleh Belanda dengan memanfaatkan masih lemahnya koordinasi kepemimpinan yang ada, namun hal itu dapat diatasi dengan berbagai perjuangan melalui diplomasi dan perang gerilya. Proklamasi yang terjadi telah memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat di seluruh Nusantara untuk menentukan masa depan kehidupan mereka sendiri. Kondisi tersebut bagi sebagian dari mereka, terutama para penguasa di daerah yang masih punya ikatan dengan pihak Belanda, mereka tetap tidak peduli dengan revolusi yang sedang terjadi, dan malah memusuhiinya. Meskipun demikian, pada dasarnya seluruh rakyat di daerah-daerah tersebut tetap mendukung revolusi yang sedang berlangsung.¹¹

Keberhasilan mengusir penjajahan bangsa asing menjadikan Indonesia dapat menyelenggarakan kehidupan bernegara secara mandiri. Dalam perjalanan selanjutnya bangsa Indonesia memilih demokrasi parlementer sebagai pilihan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara.¹² Upaya penerapan demokrasi parlementer sebenarnya adalah tidak lanjut dari upaya realisasi penerapan sistem demokrasi dalam kepemimpinan nasional. Pencanangan demokrasi sebagai sistem

¹¹ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, Bakar Bilfagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, dan Has Manadi (Jakarta, Serambi, 2005), hlm. 432-454.

¹² UUDS 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dalam sistem perpolitikan Indonesia. Lihat dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 161.

pemerintahan negara Indonesia memberikan kesempatan luas bagi seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara.

Meskipun pada awal kemerdekaan, bayang-bayang otonomisme sempat muncul dalam masa awal kepemimpinan nasional pertama tersebut, yang hal itu ditunjukkan dengan adanya fakta penyatuhan kekuasaan dalam diri seorang presiden. Keberadaan presiden yang harus merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai seorang pimpinan eksekutif dan legislatif. Untungnya hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang dibayangkan sebelumnya, karena kondisi tersebut dimungkinkan oleh belum sempatnya para tokoh-tokoh nasional dalam membentuk lembaga legislatif yang lazim dibutuhkan dalam sebuah negara demokrasi.¹³

Pencanangan demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia memberikan kesempatan luas bagi seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara. Pada awal pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia dapat berlangsung dengan baik. Kebebasan yang dapat memberikan ruang luas bagi seluruh komponen bangsa untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya telah berjalan dengan baik dan lancar. Dokumentasi kehidupan bangsa Indonesia pada masa tersebut menunjukkan adanya hak-hak rakyat yang telah didapatkan dan berekspresikan dalam bentuk kelompok-kelompok yang saling

¹³ *Ibid*, hlm. 159.

berlomba untuk membangun bangsanya melalui turut serta mayoritas rakyat dalam pemilihan anggota parlemen. Para wakil rakyat telah dapat menyuarakan aspirasi rakyatnya melalui sidang-sidang yang digelar untuk memperbaiki kehidupan bangsa.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sebagai wujud pelaksanaan demokrasi baru dapat terlaksana pada tahun 1955, dan pemilu tersebut dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis dengan tingkat partisipasi yang paling tinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia selama ini. Sebenarnya pelaksanaan pemilu telah direncanakan sejak masa proklamasi, namun dikarenakan adanya agresi militer Belanda yang memaksa seluruh komponen bangsa mengangkat senjata untuk mempertahankan republik, maka pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955.¹⁴

Pelaksanaan demokrasi sipil di Indonesia telah memungkinkan peran militer dapat diatur berdasarkan profesionalisme kerja, dan dengan menempatkannya sebagai salah satu aparatur negara saja, yang tentunya mereka hanya dapat berfungsi untuk menjaga keamanan negara dan tidak mempunyai peranan dan turut andil dalam menentukan kebijakan negara. Penempatan posisi militer tersebut adalah tepat adanya, karena apabila militer diberikan wewenang untuk menentukan kebijakan negara dengan turut serta dalam persidangan dan berdampingan bersama para wakil

¹⁴A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Telaah Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Jakarta: GIP, 1996), hlm. 42.

rakyat di parlemen, maka akan mengakibatkan timbulnya masalah baru yang sangat membahayakan keberlangsungan negara Indonesia di masa depan.

Pemberian kesempatan militer dalam menentukan kebijakan negara akan sangat membahayakan apabila terjadi perdebatan-perdebatan panas di parlemen ketika dalam proses menentukan kebijakan negara. Banyak kasus yang terjadi di berbagai negara lain yang membuktikan betapa berbahayanya militer apabila mereka turut menentukan kebijakan negara, bahkan pada sebagian negara tertentu, militer tetaplah aparatur negara yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan proses demokratisasi sebuah bangsa, mereka sering mengambil kesempatan untuk menduduki kekuasaan tertinggi negara apabila terjadi kekisruhan dalam kepemimpinan sipil, dan apabila mereka sedang memegang kepemimpinan bersama, maka yang sering terjadi adalah kepemimpinan yang mendasarkan pada ideologi otonomisme yang tentunya sangat bertentangan dengan musyawarah.

Penempatan posisi militer di luar pemerintahan tidaklah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan para wakil sipil di parlemen, karena sejak masa demokrasi parlementer militer juga banyak melakukan manuver untuk merebut kekuasaan dengan mengganggu proses berlangsungnya demokrasi yang ada, bahkan pada masa demokrasi terpimpin militer telah merancang strategi untuk dapat berperan aktif dalam pemerintahan, dan terbukti pada masa setelah kepemimpinan

Sukarno militer merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam pemerintahan yang ada.¹⁵

Iklim perpolitikan bebas yang telah dirasakan para wakil rakyat di parlemen dalam masa demokrasi liberal memang berlangsung tidak semulus yang diharapkan pada saat persetujuan pemberlakuan. Hatta sebagai salah seorang pengusung demokrasi yang juga turut bertangan dalam pemberlakuan sistem demokrasi sipil tersebut juga merasa kecewa dengan keberlangsungan demokrasi liberal di tanah air. Terhadap jalannya pemerintahan sipil yang dengan mudahnya jatuh bangun dikarenakan ulah wakil-wakil sipil sendiri bagi Hatta merupakan catatan buruk bagi keberlangsungan demokrasi yang ada. Dalam hal ini, tawaran Hatta memang lebih moderat dan bijaksana dalam artian, partai-partai politik harus memperbaiki sistem demokrasi sipil, sehingga sistem kebebasan yang ada menjadi sistem yang mempunyai nilai tawar lebih dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan dalam kesinambungan proses pembangunan bangsa. Meskipun kekecewaan Hatta tidak seradikal dan sekuat Sukarno yang menginginkan untuk mengubur keberadaan partai-partai, yang baginya dianggap lebih menyibukkan diri dengan urusan perdebatan ideologi negara di antara mereka dari pada memikirkan persatuan bangsa yang belum mapan dan sangat terancam dengan adanya pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah. Bagaimanapun

¹⁵ Mayjen Abdul Haris Nasution, merancang satu kebijakan yang memungkinkan militer berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial-politik sekaligus. Pada masa tersebut militer juga sudah mencanangkan dwi fungsi militer, salah satu istilah yang sangat dikenal pada masa orde baru. Lihat dalam Robert W. Hefner, *Civil Islam*, hlm. 90.

perbedaan pandangan para proklamator dalam menyikapi jalannya keberlangsungan demokrasi parlementer, hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan demokrasi sipil memang tidak mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan di Indonesia.¹⁶

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa memang terjadi banyak kekacauan dalam pelaksanaan demokrasi liberal, yang itu juga menjadi bibit kehancuran bagi keberlangsungan demokrasi sipil tersebut itu sendiri.¹⁷ Kekacauan dalam pelaksanaan demokrasi sipil juga menambah cepat keputusan Sukarno untuk segera melakukan pembubaran sistem yang dianggapnya terlalu kebarat-baratan tersebut dengan demokrasi ala interpretasi Sukarno sendiri, yaitu demokrasi terpimpin. Melalui dekritnya, Sukarno membubarkan demokrasi parlementer dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin.

Pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin, pada dasarnya digunakan Sukarno untuk mengakhiri kekacauan sistem parlementer akibat ulah partai-partai tanpa berusaha mengurangi peranan kelompok sipil dalam pemerintahan apalagi sampai menghilangkan proses kebebasan yang sedang berlangsung dan dirasakan mayoritas kelompok masyarakat

¹⁶ Kebebasan pada masa demokrasi parlementer bagi ricklef merupakan kebebasan yang sangat bebas dan hanya dinikmati elit kota. sehingga demokrasi hanya dapat dirasakan para kaum elit tersebut. Lihat dalam M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm.471.

¹⁷ Percobaan demokrasi gagal karena korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah yang terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan yang ditimbulkan dalam masa revolusi keimerdekaan belum terwujud. *Ibid*, hlm. 471.

Indonesia yang terbentuk dalam wadah partai-partai,¹⁸ namun dalam prakteknya kemudian pemerintahan demokrasi terpusat tersebut telah mengakibatkan matinya keberlangsungan demokrasi yang sebelumnya sedang diupayakan untuk dirintis bersama-sama.

Proses berlangsungnya demokrasi parlementer ternyata berjalan dengan kurang baik bagi keberlangsungan persatuan bangsa. Para wakil sipil di parlemen yang mendapat keleluasaan dan kebebasan dalam berdemokrasi cenderung melupakan persoalan-persoalan bangsa yang lebih urgen, seperti memperkokoh persatuan bangsa yang terancam dengan adanya berbagai pemberontakan. Di antara wakil-wakil sipil sendiri terjadi pertarungan sengit tentang ideologi negara, pertarungan ini melanjutkan perdebatan sebelumnya yang terjadi pada saat sebelum pelaksanaan kemerdekaan. Perdebatan kali ini juga tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada masa sebelumnya, kedua kubu dengan argumen masing-masing masih tetap bersih keras menggunakan ideologinya untuk digunakan sebagai landasan ideologi negara.

Jalannya roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal berlangsung dengan silih bergantinya pergantian kabinet yang berlangsung tidak terlalu lama dalam melaksanakan roda pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena adanya mosi ketidakpercayaan mayoritas anggota parlemen terhadap kinerja pemerintahan yang dijalankan oleh perdana menteri, yang notabene tidak lain adalah hasil dari pilihan wakil-wakil sipil tersebut.

¹⁸ Darmawan M.M. *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 443.

Tercatat berbagai pergantian perdana menteri dan kabinet yang berlangsung sangat cepat. Meskipun hal tersebut berlangsung terus menerus selama masa demokrasi liberal, namun penghargaan terhadap kebebasan yang terjadi di antara wakil rakyat tetap terpelihara, sehingga iklim demokratis pun masih tetap terjaga dan dapat berjalan dengan semestinya.

Terjadinya pembubaran beberapa partai yang dianggap sebagai kelompok kontra revolusioner seperti PSI dan Masyumi, pada awalnya merupakan upaya Sukarno sebagai pemimpin persatuan bangsa untuk mengurangi kerumitan yang terjadi pada masa itu. Tindakan tersebut memang sangat berguna untuk sedikit meminimalisir permasalahan bangsa yang ada dan sebagai bentuk upayanya mempertahankan persatuan bangsa,¹⁹ terbukti dengan adanya indikasi kuat dari sebagian tokoh-tokoh partai yang telah dibubarkan tersebut merupakan orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan, meskipun tindakan tersebut tidak juga dapat dikatakan sebagai tindakan terbaik yang dapat dilakukannya. Sebenarnya masih ada alternatif lain yang lebih baik dan dapat digunakan Sukarno untuk mengatasi masalah tersebut, seperti dengan memberikan kesempatan partai yang dianggap makar tersebut untuk membersihkan kondisi internal partai dari adanya tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan,

¹⁹ Para politisi Jakarta, walaupun mengusung cita-cita demokrasi, kebanyakan adalah kaum elit dan merasa sebagai pengikut budaya perkotaan yang merasa lebih unggul dari pada budaya-budaya kedaerahan. Lihat dalam M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm. 472.

sehingga nantinya diharapkan partai-partai tersebut tetap mendapatkan kebebasannya untuk dapat eksis dan terlibat dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya, sebenarnya berupaya untuk menyatukan perbedaan ideologi partai-partai dalam wadah satu pemerintahan yang lebih efektif di bawah kepemimpinannya, yang nantinya diharapkan dapat terciptanya suatu pemerintahan koalisi yang lebih kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan.²⁰ Adanya perbedaan ideologi yang sangat bertolak belakang di antara komponen pendukung demokrasi terpimpin, yang ditambah dengan ambisi kuat militer untuk mendapatkan peranan penting dalam pemerintahan merupakan faktor yang kurang disadari Sukarno dalam usaha mengimplementasikan sistem demokrasi klaimnya.

Keberanian Sukarno yang membiarkan perkembangan dan memberikan keleluasaan PKI untuk menggunakan dirinya sebagai simbol penarik massa merupakan keputusan yang harus dibayar mahal dengan kejatuhanya sebagai presiden. Padahal sebagai respresentasi kekuatan komunisme Internasional yang beroperasi di Indonesia, PKI merupakan partai yang selalu berusaha memanfaatkan setiap momentum untuk kepentingannya sendiri, yaitu mengambil alih kekuasaan tanpa mempedulikan untuk berkompromi dengan kelompok lain. Di sisi lain militer yang merasa dendam dengan perilaku sipil pada masa demokrasi liberal, berangsur-berangsur mulai mendapat kesempatan untuk dapat

²⁰ Darmawan MM. *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 444.

berperan aktif dalam pemerintahan. Dukungan militer terhadap upaya Sukarno untuk membubarkan partai-partai telah membuat mereka menemukan momentum untuk dapat membalas perlakuan para politisi sipil pada masa sebelumnya yang dianggap telah mengekang dan mematikan hasrat dan peranan politiknya.

Nilai musyawarah dalam sebuah negara, yang salah satu wujud terealisasinya, ialah dengan adanya pelaksanaan demokrasi yang baik dalam sebuah kepemimpinan di sebuah negara, pada masa kepemimpinan Sukarno hal itu tidak dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan demokrasi pada masa kepemimpinan sang proklamator, meskipun sempat berjalan sesuai dengan pelaksanaan demokrasi di negara yang sudah mapan pelaksanaan demokrasinya, yang hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan demokrasi parlementer yang berjalan baik pada awal pelaksanaannya, namun secara umum pelaksanaan sistem demokrasi pada masa kepemimpinan nasional pertama tersebut tidak berjalan dengan demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dalam pelaksanaannya.

2. Nilai-Nilai Persamaan dalam Masa Kepemimpinan Sukarno

Persamaan dalam Islam adalah suatu yang tak terbantahkan keberadaannya. Sejak agama yang di bawah Muhammad ini diturunkan, persamaan menjadi salah satu penekanan ajarannya. Sebagai agama yang dikenal sangat egaliter, Islam tidak pernah mengajarkan adanya perbedaan apapun pada para pemeluknya. Adanya perbedaan dalam Islam hanya

didasarkan pada kualitas seorang individu dalam memegang prinsip dan keyakinannya. Sehingga tidak ada alasan dalam Islam untuk mempraktekkan suatu diskriminasi dengan menggunakan alasan apapun, karena memang Islam tidak pernah menoleransi keberadaannya.

Dalam kehidupan negara, adanya persamaan bagi seluruh warga negara merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi negara. Diskriminasi pada warganya akan menjadikan negara kehilangan simpati di hadapan warganya, dan hal tersebut akan menjadikan negara menjadi tidak berarti di hadapan mereka. Persamaan hak bahkan menjadi fokus utama yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga dunia yang peduli pada hak asasi manusia (HAM). Sosialisasi penghargaan terhadap HAM bahkan semakin banyak menyita perhatian umat manusia di seluruh dunia, terutama pada negara-negara maju.

Sejak awal didirikan, negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang diperuntukkan bagi seluruh bangsa Indonesia yang itu terdiri dari seluruh rakyat yang mendiami kepulauan Nusantara yang membentang dari ujung paling barat pulau Sumatra, yaitu kabupaten Sabang sampai dengan wilayah yang berada di ujung timur pulau Papua, kabupaten Merauke. Meskipun para pemimpin nasional pada awal kebangkitan nasional dan pembentukan negara Indonesia, namun mereka sudah menyadari, bahwa keberagaman penduduk kepulauan di seluruh Nusantara dapat dipersatukan atas dasar persamaan dan tiada perbedaan yang sangat mengkhawatirkan. Dalam tataran ideal realisasinya, tidak ada

perbedaan perlakuan antara rakyat satu dengan lainnya, karena seluruh rakyat adalah pemilik negara Indonesia yang harus diperlakukan sama dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga bisa dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar persamaan hak bagi seluruh rakyatnya.

Perjuangan dalam masa revolusi fisik menunjukkan adanya semangat kebersamaan yang terbangun dari seluruh rakyat. Dengan menyadari adanya persamaan nasib sesama bangsa Indonesia yang selama ini tertindas dan ingin merdeka dari penjajahan bangsa asing, bangsa Indonesia berbondong-bondong untuk berjuang. Persamaan nasib telah membuat rakyat Indonesia menafikan segala perbedaan yang ada diantara mereka, karena bagi mereka yang terpikirkan hanya dua pilihan, antara mati karena membela tanah air tercinta atau selamanya tetap hidup menjadi budak kolonial di negeri sendiri. Sehingga kemudian, segala perbedaan yang ada tidak bisa menghalangi persatuan yang ada di antara mereka untuk mengusir penjajah. Terbukti dengan adanya kebersamaan yang di dasarkan pada persamaan nasib tersebut, bangsa Indonesia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan yang telah lama diimpikan, meskipun hal tersebut tidak diraih dengan mudah.

Perbedaan etnis yang ada pada masyarakat Indonesia, di samping menjadi kekayaan tersendiri bagi eksistensi negara Indonesia, juga menjadi masalah yang mengancam persatuan yang sudah terbangun. Etnis Jawa yang menjadi warga mayoritas, yang juga banyak menguasai

beberapa sektor pemerintahan telah mengakibatkan kecemburuan bagi para etnis lain yang menganggap etnis Jawa terlalu dominan yang mengakibatkan etnis lain menjadi terpingirkan dalam sektor pemerintahan yang ada.²¹ Bahkan pada perkembangannya kemudian, kecemburuan tersebut telah mengakibatkan adanya beberapa pemberontakan di berbagai daerah.²²

Keberadaan etnis Tionghoa dalam sejarah negara Indonesia memang selalu menyita perhatian yang sangat serius dan cukup menyita perhatian dalam setiap masa kepemimpinan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan adanya pelaksanaan persamaan hak setiap warga negara dalam sebuah negara. Dalam masa kepemimpinan Sukarno, keberadaan etnis Tionghoa mendapat perhatian serius dari pemerintahan yang ada pada masa tersebut. Kebijakan yang dilakukan pemerintahan pada demokrasi parlementer dalam menyikapi keberadaan etnis Tionghoa juga merupakan salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh bagi kebijakan pemerintahan Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada masa selanjutnya.²³

²¹ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm. 500.

²² Salah satu pemberontakan tersebut adalah pemberontakan yang mengatasnamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang juga didukung para politisi dan militer yang sebelumnya juga menjadi perwakilan dari beberapa daerah. Lihat dalam *ibid*, hlm. 500-501.

²³ "Orang-orang cina sebagai golongan yang ekslusif menolak masuknya orang lain ... terutama dalam bidang ekonomi. Mereka begitu eksklusif sehingga dalam praktiknya bersifat monopolistik", itu merupakan pernyataan Assaat dalam suatu kongres importir nasional yang sangat berpengaruh bagi kebijakan pemerintah pada etnis Tionghoa di masa demokrasi parlementer, yang dalam realisasinya pemerintah mengeluarkan peraturan (PP10 Tahun 1959) tentang larangan melakukan perdagangan bagi orang asing di tingkat kabupaten ke bawah. Gerakan Assaat tersebut dianggap sebagai awal mula rasialisme anti Tionghoa di Indonesia. Lihat

Peraturan pemerintah yang melarang orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah dan harus menyerahkan pada warga pribumi secara tidak langsung telah melarang etnis Tionghoa melakukan aktivitas kehidupannya, padahal pada umumnya etnis Tionghoa adalah etnis yang mendominasi perdagangan dan perekonomian nasional pada masa demokrasi sipil tersebut. Dalam realisasinya, pemerintah mengerahkan militer untuk merealisasikan peraturan tersebut, sehingga peraturan tersebut benar-benar membuat warga Tionghoa banyak yang melakukan eksodus dan kembali ke negara asal.²⁴

Meskipun adanya peraturan tersebut didasarkan pada upaya pemberdayaan etnis pribumi yang memang dalam bidang perdagangan kalah bersaing dengan etnis Tionghoa dan tidak ada yang membelah, namun peraturan tersebut adalah wujud belum terlaksananya persamaan bagi seluruh warga negara. Karena peraturan yang diskriminatif tersebut membuat banyak keluarga dari etnis Tionghoa yang tercerai berai dengan adanya peraturan tersebut, padahal sebagian besar dari mereka adalah etnis yang telah lama mendiami bumi Nusantara, dan sudah turun-temurun anak keturunannya hidup di bumi Indonesia, bahkan sebagian dari mereka turut berjuang bagi berdirinya dan tegaknya republik Indonesia.²⁵ Meskipun

dalam Tempo, *Peraturan yang Mengusur Tionghoa*, Edisi 25/XXXIIII/13-19 Agustus (Jakarta: 2007), hlm. 94-95.

²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

²⁵ *Ibid*, hlm. 96-99

tidak dipungkiri, bahwa sebagian dari mereka, seperti yang dituduhkan merupakan antek-antek penjajahan Belanda, tapi bukankah dari etnis pribumi juga, terutama kaum priayinya merupakan antek penjajahan Belanda. Sehingga bisa dikatakan keberadaan peraturan perdagangan yang diskriminatif yang sampai mengusir etnis Tionghoa dari bumi Nusantara merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai persamaan. Bahkan bagi seorang pengamat seperti Ricklef, kebijakan diskriminasi terhadap etnis cina merupakan kesalahan akibat kecerobohan para elit politik di Jakarta yang sengaja dilimpahkan pada etnis yang banyak menguasai sektor ekonomi tersebut.²⁶

Persamaan dalam negara Indonesia, terutama persamaan hak belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan iklim perpolitikan yang terpaku yang mementingkan pada kepentingan politik golongannya masing-masing, sehingga melupakan upaya perwujudan persamaan hak di antara sesama warga negara. Bahkan karena belum mampunya negara mewujudkan adanya persamaan tersebut, negara telah melakukan kebijakan diskriminatif yang mengakibatkan mayoritas keluarga salah satu etnis tertentu menjadi tercerai-berai.

3. Nilai-Nilai Keadilan dalam Masa Kepemimpinan Sukarno

Setiap manusia merindukan adanya suatu keadilan, karena dalam tiap jiwa seorang manusia yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang

²⁶ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm. 499-500.

terus menyinari kesadarannya, dan sinar itu akan selalu mendorong manusia untuk hidup dengan adil dan melaksanakan serta melindungi apa yang dianggapnya adil.²⁷ Keadilan merupakan suatu yang akan terus bersentuhan dengan kehidupan manusia, dan hal itu tidak akan bisa dilepaskan sepanjang kehidupannya.

Sampai kapan pun hak dan martabat manusia akan selalu terancam keberadaannya, dan dengan keadilan akan tercapai adanya persamaan dan kebebasan bagi semua manusia. Suatu keadilan tidak akan mendahulukan keuntungan segelintir manusia demi mengorbankan urgensi kepentingan bersama, tetapi keadilan akan selalu menekankan pada pembagian yang setara dan seimbang bagi setiap manusia, bahkan pada makhluk lainpun keadilan merupakan suatu yang harus tetap ditegakkan kapanpun dan di manapun adanya.

Pada dasarnya keadilan mengidealkan adanya pelaksanaan suatu hak yang sekaligus juga mendistribusikan adanya suatu kewajiban secara adil bagi semua manusia, bahkan para filosof memandang keadilan adalah suatu kebijakan yang utama, sebagaimana Aristoteles yang memandang keadilan sebagai kebijakan yang lengkap dalam arti yang seutuhnya. Karena keadilan sesungguhnya bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memiliki bagi diri sendiri, melainkan lebih dari itu

²⁷ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm. 287.

keadilan juga merupakan "pelaksanaan aktif", dalam artian harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.²⁸

Dalam Islam keadilan merupakan salah satu sifat Tuhan dan kebijaksanaannya dalam mengatur roda kehidupan. Keadilan menyangkut seluruh kehidupan dalam Islam dan merupakan juga suatu hukum Tuhan, dan implementasinya sendiri bertujuan terciptanya keadilan dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Dengan ditegakkannya keadilan, maka kehidupan manusia akan menjadi tertib dan berkualitas, dan tidak diterapkannya keadilan akan mengakibatkan kehidupan menjadi milik perorangan maupun kelompok tertentu yang sewenang-wenang dan tidak mempedulikan kepentingan semua manusia. Dalam suatu keadilan terdapat adanya persamaan dan kesetaraan manusia di antara manusia lain, dan persamaan tersebut juga selalu didasarkan pada kebenaran.³⁰

Secara umum dapat dikatakan, bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dari pada agama-agama lain, bahkan banyak orientalis yang mengakui, bahwa Islam merupakan *religion of justice*, agama keadilan.³¹ Nurcholis Madjid sendiri berpendapat bahwa tidak ada kutukan kitab suci yang lebih keras dari pada kutukan al-Qur'an

²⁸ Bernard Adeney-Risakota (Editor), *Keadilan dan Ham dalam Perspektif Agama-Agama*, hlm. 195.

²⁹ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm. 288.

³⁰ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 108.

³¹ *Ibid.* hlm. 268.

kepada para pelaku ekonomi yang tidak adil dan yang mengabaikan bahkan menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat luas.³²

Dalam implemetasinya, penegakan keadilan dalam suatu negara pada masa modern menuntut adanya suatu institusi atau lembaga negara yang dapat menaungi kepentingan penegakan keadilan bagi seluruh warganya. Penegakan keadilan dalam suatu negara mengidealkan terciptanya suatu kehidupan negara yang didasarkan pada adanya jaminan persamaan hak bagi seluruh warganya di mata hukum tanpa adanya suatu perbedaan apapun. Melalui lembaga peradilan, negara harus melindungi setiap warganya dari adanya segala bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada masa awal kepemimpinan nasional pertama, telah diupayakan terciptanya suatu keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan kuat dirinya dan para tokoh pendiri bangsa untuk membentuk negara berdasarkan pembagian kekuasaan secara proporsional. Keberadaan lembaga tinggi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam roda pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara demokrasi yang benar dalam masa modern. Pembagian tersebut dipandang cukup membantu untuk menegakkan keadilan, karena hal itu akan menjadikan adanya pembagian yang jelas dalam pelaksanaan kekuasaan pada suatu negara.

³² Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm.270-271

Adanya pemerintahan demokrasi parlementer merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan pada keadilan, hal tersebut juga merupakan harapan-harapan tinggi seluruh komponen bangsa yang dihasilkan dari keberhasilan meraih kemerdekaan.³³ Beragamnya latar belakang perdana menteri yang memimpin kabinet selama demokrasi parlementer menunjukkan juga adanya upaya pemerataan kekuasaan yang coba dilakukan para wakil sipil di parlemen.

Pemerintahan demokrasi parlementer telah mengupayakan penegakan keadilan dapat terlaksana dengan keberadaan institusi yudikatif yang bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari eksekutif dalam melaksanakan tugasnya. Hukum tetap dapat ditegakkan meskipun menghadapi problem kekurangan tenaga ahli, dengan perlahan problem tersebut dapat diatasi dengan baik. Mahkamah Agung dan kejaksaan bekerja dalam suasana yang sehat dan jauh dari adanya penyimpangan.³⁴ Pengadilan mempunyai keberanian untuk mengadili para pejabat yang sedang menjabat tanpa ada ketakutan adanya intervensi dari eksekutif.³⁵ Meskipun masa kemandirian institusi peradilan diakhiri dengan adanya penetapan darurat perang pada 1957 dan berlangsungnya demokrasi

³³ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm. 471.

³⁴ Tempo, *Menguji Kemandirian Mahkamah*, Edisi 25/XXXIII/13-19 Agustus, (Jakarta: 2007), hlm. 53.

³⁵ "Menteri-menteri diusut dan diadili", sebagaimana pernyataan Adnan Buyung Nasution, sebagai seorang yang menjadi Jaksa pada masa tersebut. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 55.

terpimpin 1959, namun masa tersebut adalah masa terbaik dan merupakan keemasan institusi peradilan di Indonesia.

Dalam masa demokrasi terpimpin, penegakan keadilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, institusi pengadilan sebagai institusi hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya secara independen karena adanya intervensi pemerintah atau tepatnya oleh Sukarno. Adanya intervensi terhadap institusi peradilan sebenarnya telah terjadi sejak akhir masa demokrasi liberal, di mana pada masa tersebut Sukarno berhasil mengendalikan institusi peradilan dengan menempatkan ketua mahkamah agung berdasarkan pada kemaunya dan bukan berdasarkan mekanisme yang berlaku sebelumnya.³⁶

Menurut Syafii Maarif, demokrasi terpimpin dalam praktiknya adalah sistem politik dengan baju demokrasi tapi minus demokrasi.³⁷ Dalam penelusuran sejarawan guru besar Universitas Negeri Yogyakarta tersebut, ketika partai-partai yang sangat berkuasa dalam masa demokrasi parlementer tetapi melupakan dan menelantarkan kepentingan negara secara keseluruhan, maka itu sangat membahayakan. Melihat kondisi bangsa yang dianggapnya sangat membahayakan tersebut, Sukarno sebagai seorang yang sangat mempedulikan persatuan tidak menginginkan

³⁶ Pada 1 April 1959 Jaksa Agung Soeprapto dipecat oleh presiden Sukarno karena dianggap memberi tekanan pada presiden, dan selanjutnya presiden mengantinya dengan Mr. Gatot Turumaniharja yang dianggap tidak membahayakan kekuasaan Sukarno, namun nasib kurang beruntung bagi jaksa penganti tersebut, karena ia hanya dapat bertahan hanya dalam empat bulan saja. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 56.

³⁷ A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik*, hlm. 47.

proses ini terus berlanjut dan menghancurkan persatuan yang telah lama diperjuangkan sejak masa pergerakan nasional. Ia berupaya melakukan perubahan dengan mengungkapkan konsepsi-konsepsinya. Disadari atau tidak dalam praktek pemerintahan sebelum demokrasi terpimpin, Sukarno merasa hanya menjadi tukang stempel kebijakan yang dihasilkan dari sidang-sidang wakil rakyat tanpa mendapat kesempatan untuk menentukan kebijakannya yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan negara.³⁸

Kebijakan-kebijakan Sukarno sendiri dalam masa demokrasi terpimpin lebih dicurahkan untuk mematikan lawan-lawan politiknya, terutama yang dianggapnya sangat membahayakan revolusi yang dibangunnya. Dalam kabinet demokrasi terpimpin Sukarno menempatkan orang-orang yang sukai dan tidak memberikan ruang bagi lawan-lawan politiknya untuk duduk dalam kabinet,³⁹ Ia juga berupaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan-kekuatan pendukung pemerintahan yang saling bertikai untuk memperebutkan pengaruhnya dalam kekuasaan dari dirinya.

Selama masa kepemimpinannya, Sukarno belum mampu menampung dan menaungi semua komponen bangsa sebagai satu kesatuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara. Banyak kebijakan Sukarno dalam masa kepemimpinannya yang membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang lebih mendahulukan kehendak pribadi dari pada kepentingan bersama, seperti

³⁸ *Ibid.* hlm. 45-50.

³⁹ *Ibid.* hlm. 50.

dalam menghadapi oposisi Tan Malaka dan kelompoknya yang terkenal radikal, kepemimpinan Sukarno tidak memperlakukan tokoh dan kelompok tersebut secara bijaksana dan adil, sehingga mengakibatkan tokoh komunis nasionalis tersebut terbunuh di Kediri, di tangan tentara bangsa sendiri tokoh komunis tersebut meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan tidak layak bagi tokoh perjuangan sekaliber Tan Malaka. Sebagai kepemimpinan yang seharusnya menampung segala aspirasi rakyatnya, Sukarno harus dapat melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terburuk yang akan menimpa warga negaranya tersebut, meskipun aspirasi yang diperjuangkan tersebut berbeda dengan keinginannya. Memang masa tersebut, adalah masa transisi yang membutuhkan keputusan cepat dalam menghadapi segala masalah yang ada, namun penyikiran sesama kelompok pejuang atas nama mewujudkan sebuah negara yang berdaulat merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak etis. Hal tersebut cenderung memaksakan sebuah kebijakan, apalagi masih dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan kelompok tersebut untuk berjuang bersama-sama dalam menyingkirkan penjajah dan membentuk sebuah negara yang dikehendaki bersama bagi kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menghadapi masalah kekisruhan di parlemen, Sukarno berbuat sewenang-wenang dengan membubarkan sistem liberal tersebut dan menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin. Meskipun ia beralasan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin pada 1959 adalah puncak keotoriteran Sukarno, dan merupakan bentuk ketidakadilannya dalam memimpin bangsa Indonesia. Meskipun sang proklamator tersebut beralasan pemberlakuan sistem tersebut untuk menjaga keutuhan bangsa dari adanya perpecahan, namun tindakannya telah membunuh keberlangsungan demokrasi. Padahal banyak tokoh-tokoh⁴⁰ yang terlibat dalam masa demokrasi parlementer dan para pengamat⁴¹ perpolitikan Indonesia berpendapat bahwa, apabila sistem demokrasi sipil tersebut dibiarkan tumbuh dan menyelesaikan persoalannya sendiri, maka bangsa Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik dalam dunia perpolitikannya. Ignas Kleden berpendapat, argumen-argumen yang dibangun dalam perdebatan di parlemen pada masa demokrasi liberal merupakan argumen yang didasarkan pada pemikiran dan argumentasi yang mendalam, serta membutuhkan waktu lama dalam prosesnya,⁴² yang tentunya argumen-argumen tersebut tidak hanya didasarkan pada kepentingan partainya semata, tetapi lebih dari itu adalah bentuk pencarian para wakil-wakil sipil

⁴⁰ Hampir semua tokoh yang selama ini berbeda pandangan dengan Sukarno, dan terlibat dalam sistem demokrasi parlementer menentang pembubaran demokrasi impor tersebut. Diantaranya Natsir yang berpandangan bahwa apabila demokrasi liberal dibiarkan tumbuh dan berkembang maka Indonesia bisa keluar dari berbagai kesulitan. Lihat dalam Tempo, *Panas Di Sidang Akrab Di luar*, hlm. 40-41.

⁴¹ Salah satu pengamat tersebut adalah Herbert faith yang sangat tertarik mengamati perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, ia sangat terpikat dengan keberlangsungan pelaksanaan demokrasi sipil tersebut yang bisa dikatakan merupakan suatu hal yang jarang terjadi di negara muda atau negara yang belum terlalu lama meraih kemerdekaannya seperti Negara Indonesia. Lihat dalam *ibid*, hlm. 26.

⁴² Ignas Kleden, *Tarikan Konstitutualisme+Jebakan Tradisionalisme= RI*. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 50-51.

tersebut dalam upayanya untuk membelah dan memperjuangkan kepentingan rakyat, yang tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan suatu sistem ideal bagi masyarakat Indonesia.

Keadilan dalam masa kepemimpinan Sukarno sebagaimana dengan yang diungkapkan di atas menunjukkan, bahwa keadilan belum dapat sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa tersebut. Keadilan telah termanifestasikan melalui kehidupan bangsa bernegara Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dalam pelaksanaannya. Sedangkan kebijakan-kebijakan Sukarno yang berupaya untuk menginterupsi pelaksanaan kehidupan negara yang berjalan sangat demokratis tersebut merupakan ancaman bagi terlaksananya proses keadilan yang terjadi. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut ia lakukan atas nama menjaga persatuan yang terancam dan berusaha mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun tetap saja kebijakan-kebijakan tersebut telah merusak tatanan demokrasi yang ada, bahkan menghancurkan independensi lembaga peradilan yang sudah terbangun. Memang Sukarno adalah tokoh bangsa yang berjasa besar dalam mengintegrasikan kebhinekaan masyarakat Indonesia dalam kesatuan negara Indonesia, namun dalam proses keberlangsungan pendewasaan iklim perpolitikan nasional, Sukarno cenderung gagal dan sebaliknya ia telah menghalangi keberlangsungan proses demokratisasi yang ada. Kebijakan-kebijakan Sukarno dalam upayanya membangun negara Indonesia yang berdaulat terkadang memaksanya harus melakukan

penyingkirkan kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan kehendaknya. Bisa dipastikan dengan kondisi tersebut, keadilan sebagai aturan bersama yang dapat mengikat perbedaan dalam suasana berimbang dan mendapatkan secara proporsional tidak bisa berjalan seperti yang diajarkan dalam Islam dan yang sedang diterapkan dalam sistem demokrasi kontemporer, karena independensi pengadilan sebagai penengah adanya pertikaian dan penegak keadilan tidak bisa berjalan efektif apabila kekuasaan masih mengantungkan pada figur karismatis sebagai ujung tombak utama dalam segala penyelesaian di negara yang persatuan masih menjadi topik utama dalam masalah kenegaraannya.

4. Nilai-Nilai Kebebasan dalam Masa Kepemimpinan Sukarno

Kebebasan merupakan suatu yang amat dirindukan dalam kehidupan dunia, dan dengan mengingat kata kebebasan akan menimbulkan kebahagiaan di dalam pikiran dan hati setiap insan, karena kebebasan merupakan harapan terbesar manusia dalam menjalani hidupnya.⁴³ Secara umum, gambaran perjalanan kehidupan manusia tidak lain adalah sejarah perjuangannya untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dan halangan, yang dalam arti luasnya adalah perjuangan untuk membebaskan diri dari segala bentuk keterkungkungan determinasi alam dan segala halangan yang dapat menghalangi potensi manusiawinya untuk berkembang. Kebebasan akan lebih berarti bagi kehidupan manusia, apabila kebebasan dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat

⁴³ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm. 354.

yang lebih manusiawi atau yang lebih sesuai dengan keluhuran martabat kemanusiaan.⁴⁴

Pada dasarnya kebebasan merupakan hak fundamental bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kebebasan bagi manusia sama artinya dengan kehidupan itu sendiri, karena dengan kebebasannya manusia dapat menikmati dan memaknai hidupnya. Kebebasan merupakan cita-cita ideal kemanusiaan, sebagaimana pandangan Hans Kung yang memandang kebebasan sebagai sebuah tahap kemanusian tertinggi atau *Humamum*.⁴⁵ Bisa diartikan juga bahwa kebebasan merupakan perjuangan manusia untuk menemukan kemanusiaannya yang telah terkontaminasi dan terhalangi oleh faktor-faktor mengganggu, yang hal itu tidak lain datangnya terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yang ada.

Sejarah keberhasilan berbagai peristiwa revolusi yang terjadi di belahan penjuru dunia, telah menunjukkan keinginan besar dari setiap bangsa untuk meraih kemerdekaan dan membebaskan bangsanya dari adanya penjajahan bangsa asing yang cenderung menindas. Pada umumnya segala perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan akan selalu didedikasikan bagi upaya pembebasan kehidupan rakyat dari berbagai bentuk penindasan yang telah dilakukan oleh bangsa asing yang mengeksplorasi dan memanfaatkan suatu bangsa untuk keberlangsungan

⁴⁴ I. Bambang Sugiharto dan Agus Rahmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 262.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 262

penjajahannya,⁴⁶ termasuk di dalamnya adalah kebebasan melaksanakan kehidupan beragama yang merupakan salah satu hak dasar dalam kehidupan manusia.

Misi utama kedatangan Islam tidak lain adalah membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu yang menghalangi potensi kemanusiaannya untuk berkembang. Manusia sebagai makhluk yang diberi wewenang utama oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan dunia, adalah makhluk yang mempunyai potensi dan peluang untuk meningkatkan dirinya agar mendapatkan kemajuan, kemuliaan, dan kejayaan, namun untuk mendapatkan kualitas tersebut manusia dituntut untuk senantiasa mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁴⁷

Dengan selalu berupaya untuk membersihkan dirinya secara konsisten, Islam menjamin manusia akan mendapatkan kemuliaan yang diharapkannya. Karena sebenarnya setiap manusia telah dianugerahi kemampuan yang akan terus dapat berkembang, dan apabila kemampuan tersebut dapat dioptimalkan secara maksimal, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi setiap manusia itu sendiri. Islam dalam hal ini juga telah memerankan diri untuk menolong manusia menundukan cengkeraman kekuasaan nafsu rendahnya, dan dengan jalan ini akan diraih suatu kemerdekaan atau kebebasan yang riil. Islam tidak pernah

⁴⁶ Imam Yudotomo, *Meretas Langkah Sosialisme Demokrasi*. Lihat dalam Muhibbin M. Dahlan (editor), *Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat?* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hlm.31-33.

⁴⁷ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Teraju, 2004). hlm. 126-127.

menghendaki manusia mengembangkan individualisme dengan kedok kebebasan, dan sebaliknya Islam berusaha mengeliminir kecenderungan manusia untuk menjadi individualis dan melupakan kepentingan yang lebih objektif dalam kehidupan bersama.

Dalam kehidupan kaum muslim, kecintaan kepada Tuhan dan ketundukan kepada-Nya tidak berarti sedikitpun, bahwa kaum muslim adalah kaum yang tidak tertarik pada kebebasan sosial dan politik. Dalam sejarah kehidupannya, hasrat setiap manusia akan kebebasan yang didasarkan pada siapa dan apa nilai budayanya merupakan suatu kecenderungan yang sangat universal, dan sepanjang sejarahnya umat Islam telah menunjukkan hasrat besar terhadap kebebasan bagi diri dan masyarakat mereka yang tidak kalah juga dengan keinginan siapapun dan bangsa manapun di dunia.⁴⁸ Keberadaan masyarakat Islam awal (masa Nabi) yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam membangun peradabannya dengan penekanan membentuk suatu komunitas yang didasarkan pada kemaslahatan bersama, yang hal itu juga dapat dibuktikan dengan keberadaan Piagam Madinah sebagai pengatur kehidupan sosial kemasyarakatan yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat yang ada pada masa tersebut.

Pada masa perang dunia, perlawanan hampir semua bangsa-bangsa muslim terhadap adanya penjajahan yang terjadi di negerinya juga menunjukkan tekad kuat bagi bangsa-bangsa muslim tersebut untuk

⁴⁸ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm. 358.

mandiri dan terlepas dari adanya cengkeraman penjajahan. Karena pada prinsipnya setiap muslim beranggapan, bahwa untuk mencapai kebebasan hakiki tidak harus bebas dari Tuhan dan agama, dan untuk merangkul kebebasan lain di luar teks yang ada sangatlah terbuka, asalkan kebebasan tersebut tidak merusak keimanan mereka dan segala yang memberi arti bagi kehidupan mereka.⁴⁹

Dalam masa kepemimpinan Sukarno, pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada kebebasan yang dimulai dengan terjadinya proklamasi dan dilanjutkan dengan penerapan sistem demokrasi merupakan bentuk eksperimen dan pencarian bersama semua komponen bangsa di bawah pemimpin besar revolusi untuk menemukan kehidupan bernegara yang lebih baik dari pada masa sebelumnya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Terjadinya peristiwa proklamasi adalah revolusi kemerdekaan yang telah memberikan suatu kemungkinan kepada seluruh komponen bangsa untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan impian mereka selama ini, kebebasan rakyat yang telah lama terampas oleh penjajahan telah didapatkan kembali dalam masa tersebut, segala bentuk intimidasi dari pemerintahan bangsa asing yang sering mereka rasakan telah pergi seiring dengan hengkangnya kolonial penjajah akibat kekalahan dari musuh perangnya. Bagi seluruh rakyat, proklamasi telah memberi kekuatan yang

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 359.

dahsyat bagi perlawanan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Harapan akan kebebasan yang terbentang telah membuat seluruh komponen bangsa terus bersemangat untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kekuatan penjajah yang masih terus mengancam. Ada nuansa kebebasan yang tercipta dan dirasakan oleh mayoritas rakyat dari bangsa yang majemuk tersebut untuk berinisiatif dan turut bergabung dengan republik baru di bawah kepemimpinan nasional, dan rasa tersebut tidak akan mungkin dirasakan pada masa pemerintahan bangsa asing.⁵⁰ Adanya jaminan kebebasan bagi seluruh rakyat telah memberikan kesempatan mereka semua untuk dapat memperjuangkan nasibnya, dan sebagaimana yang dipikirkan pemikir politik kontemporer seperti Rawls, sebenarnya pemberian kebebasan yang sama pada seluruh rakyat akan telah memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk dapat merubah posisinya yang sebelumnya kurang beruntung untuk menjadi lebih baik.⁵¹

Keberhasilan para pemimpin nasional yang menyepakati penggunaan Pancasila dengan menafikan penggunaan Piagam Jakarta sebagai landasan negara merupakan keberhasilan para pemimpin nasional untuk melaksanakan kehidupan negara yang memberi keleluasaan pelaksanaan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan apabila pada masa transisi menuju kemerdekaan tersebut para pemimpin nasional tetap menggunakan Piagam Jakarta sebagai landasan

⁵⁰ M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm. 432.

⁵¹ Bernard Adeney-Risakota (Editor), *Keadilan dan Ham dalam Perspektif Agama-Agama*, bahan kuliah tidak diterbitkan, hlm. 219.

negara, maka bisa dipastikan negara Indonesia tidak akan memiliki wilayah seluas negara Indonesia yang ada pada masa sekarang. Indikasi ketidak setujuan wilayah-wilayah yang dihuni para pemeluk agama lain terhadap formalisasi syariat Islam sangatlah nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan bisa dikatakan sangat mengancam persatuan yang sudah ada pada masa tersebut.⁵² Sehingga keberhasilan para pemimpin nasional yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara patutlah disukuri oleh bangsa Indonesia yang memang sangat beragam.

Perdebatan ideologi negara yang berlangsung sangat sengit antar pendukung gagasan negara Islam dan lawannya di parlemen, terutama yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sangatlah mengancam persatuan bangsa, apalagi bila dikaitkan dengan kebebasan beragama dalam suatu negara. Perdebatan yang banyak menyita waktu dan menemukan jalan buntu tersebut memang sangat mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia secara umum, tidak heran pihak yang menentang formalisasi Islam bukan saja dari kalangan non muslim, tapi dari kaum muslim yang tidak bergabung dengan partai

⁵² Dalam pemungutan suara untuk penetapan Piagam Jakarta sebagai landasan Negara A.A maramis dan tokoh-tokoh agama lain, terutama dari kalangan Kristen tidak berdiri sebagai bentuk ketidak setujuan mereka terhadap pemberlakuan piagam Jakarta. Di sisi lain melalui para perwira angkatan laut Jepang para penduduk di Indonesia timur menyampaikan ketidak setujuan mereka pada teks Piagam Jakarta yang mencantumkan tujuh kata yang sangat identik dengan umat Islam. Lihat dalam Darmawan M. M. *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 234-235.

nonislampun banyak yang tidak menyetujui pemberlakuan aturan yang dianggap sangat ekslusif tersebut.⁵³

Adanya aspirasi politik yang mendasarkan ideologinya pada agama tertentu telah mengancam keberlangsungan kehidupan bersama, karena hal tersebut mengakibatkan pemeluk agama lain merasa terancam keberadaannya. Memang klaim dari para pengusung diterapkannya syariat Islam mengatakan bahwa formalisasi syariat Islam akan melindungi semua warga negara Indonesia, meskipun warga negara tersebut tidak beragama Islam. Keberadaan hukum yang hanya didasarkan pada agama tertentu akan mengakibatkan warga negara yang bukan pemeluk agama yang diundangkan tersebut menjadi warga negara kelas dua, dan ada kecenderungan warga negara tersebut akan dianktirikan negara.

Sebagai seorang pemimpin nasional, pribadi Sukarno adalah pribadi yang sangat menghargai kebebasan beragama. Hal ini terjadi mungkin dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang melakukan pernikahan berbeda agama yang kebetulan juga dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan yang tidak bisa dinafikan adalah adanya kultur Jawa yang sangat mempengaruhi pendidikannya selama ini, terutama pada kehidupan masa kecilnya, ditambah dengan tempaan pendidikan sekuler yang ia dapatkan dari sekolah-sekolah Belanda yang ia tempuh selama ini.

⁵³Perdebatan di parlemen tentang Piagam Jakarta memang berlangsung dengan berlarut-larut dan menemui jalan buntu. Ada dua kubu yang terlibat dalam perdebatan sengit tersebut, yaitu kubu Islam yang terdiri dari partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, dan PSII, dan kubu Pancasila yang terdiri dari partai PNI, PKI, dan Murba. Lihat dalam Tempo. *Panas di Sidang Akrab di Luar*, hlm. 41.

Bisa dikatakan di antara para pemimpin nasional yang ada pada masa kepemimpinan Sukarno, ia adalah pemimpin yang paling memperjuangkan adanya kebebasan beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila tidak ada tokoh proklamator tersebut, mungkin negara Indonesia adalah negara yang terjerembab dalam kehidupan negara yang berdasarkan pada satu agama saja, dan tentunya sangat mengancam keberadaan eksistensi agama lain. Sejarah nasional menunjukkan, bahwa sejak Indonesia belum merdeka Sukarno sudah sering melakukan perdebatan, terutama dari para pejuang muslim yang umumnya menginginkan berdirinya suatu negara Indonesia yang didasarkan pada landasan Islam dalam kehidupan kenegaraannya. Tercatat Sukarno sering melakukan perdebatan dengan tokoh-tokoh muslim baik secara resmi maupun perdebatan biasa, seperti dengan A. Hasan dari Persatuan Islam (Persis), M. Natsir, yang dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sepak terjang Masyumi selama ini,⁵⁴ dan Kibagus Hadikusumo dari Muhamadiyah. Jadi tidak bisa diragukan bahwa pribadi Sukarno adalah pribadi seorang pemimpin yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dalam kehidupan negara Indonesia.

Kebebasan beragama dalam masa kepemimpinan Sukarno, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam dan yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi, merupakan sesuatu yang belum dapat

⁵⁴ Di bidang politik, Natsir adalah peletak “pola dasar” perjuangan Islam melalui saluran politik. Di bawah kepemimpinannya pula Masyumi berhasil meraih posisi teratas dari seluruh perolehan partai Islam sepanjang sejarah pemilu di Indonesia selama ini. Lihat dalam Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta, Sipres, 1994), hlm. 141.

dilaksanakan dan dirasakan dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia. Kebebasan beragama yang dirasakan seluruh komponen bangsa hanya didapatkan dengan keberadaan Pancasila sebagai landasan negara yang menghargai adanya kebebasan beragama, namun sebagai negara yang terdiri atas berbagai agama, negara Indonesia sangat terancam kebebasan beragamanya yang diakibatkan perilaku politik para politisi yang berideologi agama tertentu, yang ingin mengganti Pancasila dengan landasan kehidupan negara yang diambil dari agama mereka.

5. Nilai-Nilai Amanah dalam Masa Kepemimpinan Sukarno

Setiap kelompok merindukan kepemimpinan yang berlandaskan pada kejujuran dan tanggung jawab dalam komunitasnya, apalagi bagi komunitas besar seperti sebuah negara. Kepemimpinan yang berlandaskan pada kejujuran dan tanggung jawab adalah kepemimpinan yang akan mempunyai kredibilitas yang baik di mata rakyatnya. Kredibilitas pemimpin merupakan harga mati bagi keberhasilan sebuah kepemimpinan, dan apabila pemimpin tidak mempunyai kredibilitas, maka dengan sendirinya kepemimpinan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan mungkin akan diturunkan secara tidak semestinya oleh rakyatnya.

Para pemimpin nasional pada masa kemerdekaan adalah para pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Meskipun banyak perbedaan pandangan tentang strategi perjuangan dalam memaknai kemerdekaan yang telah dikumandangkan, namun perjuangan mereka selalu

didedikasikan pada kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bahkan demi mewujudkan cita-cita mereka tentang eksistensi Indonesia, di antara mereka harus saling bertarung dikarenakan perbedaan pandangan tentang cara perjuangan yang dianggapnya tidak mungkin dipertemukan. Perbedaan visi perjuangan memang tidak terhindarkan dalam masa revolusi kemerdekaan. Sebagai bangsa yang baru merdeka dan belum lama dijajah bangsa asing, Indonesia adalah lahan yang subur bagi berkembangnya berbagai ideologi perjuangan, yang sebagian juga diperkenalkan dari negeri penjajah Belanda.

Bagi Mohamad Roem pemerintahan Indonesia selama sebelum demokrasi terpimpin adalah pemerintahan yang bertanggung jawab, meskipun pimpinan pemerintahan parlementer pada masa tersebut jarang ada yang dapat bertahan lama. Menurut tokoh Masyumi yang sempat menjadi perdana menteri tersebut, meskipun pemerintahan dengan cepatnya silih berganti, namun para pimpinan kabinet tersebut sangat bertanggung jawab terhadap segala kinerja dan kebijakannya pada para anggota parlemen.⁵⁵

Bagi beberapa pengamat asing, selama masa pemerintahan demokrasi parlementer, kepemimpinan nasional mengalami dinamika kepemimpinan yang berjalan kurang baik, dalam artian kepemimpinan nasional masih belum mampu menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawah kehidupan rakyat menjadi lebih baik dan menjadikan negara

⁵⁵ Mohamad Roem. *Diplomasi = Ujung Tombak Perjuangan RI*, hlm. 192.

Indonesia mengalami pendewasaan dalam iklim perpolitikannya. Ada dua tipe kepemimpinan yang ada pada masa sebelum pelaksanaan demokrasi terpimpin, yang keberadaan keduanya bagi para pengamat malah mengakibatkan tidak terlaksananya sistem demokrasi Indonesia secara semestinya, bahkan mengakibatkan demokrasi yang terbangun menjadi hancur. Keberadaan tipe pemimpin *solidarity maker* (pemimpin masa) dalam diri Sukarno yang mengalahkan tipe pemimpin administrator (ahli pemerintahan) yang ada pada masa tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami masalah serius dalam proses pemerintahan demokrasinya. Padahal kepemimpinan negara demokrasi umumnya mengandalkan pada kebijakan yang lebih bersifat rasional dan bukan pada keahlian dalam menghimpun dan membakar masa seperti yang terjadi di Indonesia.⁵⁶

Secara umum, tolak ukur Islami apa tidaknya sebuah kepemimpinan harus didasarkan pada tanggung jawab dan kesungguhan seorang pemimpin dalam membangun pemerintahannya menjadi pemerintahan yang dapat mengayomi seluruh rakyatnya dan juga mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Sukarno dengan segala kemahirannya dan kelemahannya telah banyak berjasa besar dalam membangun negerinya yang disertai komitmennya untuk memperluas dan mempertahankan negaranya. Nabi Muhammad dalam memimpin umatnya

⁵⁶Tempo, *Menimbang Demokrasi Liberal*, hlm. 41.

pada masanya adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab terhadap nasib umatnya, bahkan ketika ajal hampir menjemputnya, nabi masih sempat bertanya tentang nasib umatnya. Sama seperti nabi SAW, Sukarno adalah pemimpin yang rela jatuh dari kekuasaannya hanya untuk mempertahankan idealismenya tentang jalinan persatuan nasional seluruh komponen bangsa, ini ditunjukkan dengan upayanya untuk menyatukan empat besar kekuatan politik bangsa Indonesia yang ada pada masa tersebut. Dengan konsep Nasakomnya (penyatuan berbagai golongan dalam satu pemerintahan, yang terdiri dari, PNI, PNU, PKI, dan ditambah Militer) merupakan bukti nyata tentang ambisinya untuk menyatukan perbedaan yang ada, dan hal tersebut juga yang harus dibayar mahal olehnya dengan kejatuhan sebagai Presiden Indonesia. Bahkan yang lebih ironis lagi adalah, setelah tidak menjadi presiden, Sukarno dibiarkan hidup dalam kesendiriannya dan segala penyakit yang telah menggerogotinya.⁵⁷

Bagaimanapun berlangsungnya perjalanan kepemimpinan Sukarno, harus diakui ia adalah orang yang paling pantas memimpin negara Indonesia pada masa tersebut. Sukarno berjasa besar dalam berdirinya Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia disegani di dunia internasional, bahkan menurut Jeanne S. Mintz, Sukarno merupakan simbol dari bangsa Indonesia itu sendiri,⁵⁸ sehingga dalam menilai

⁵⁷ Darmawan MM, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, hlm. 535-539.

⁵⁸ Jeanne S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, hlm. 287.

kepemimpinannya haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan juga kehebatannya dalam mengatasi persaingan di antara tokoh-tokoh nasional lain yang ada pada masanya. Sejarah pergerakan nasional juga menunjukkan, bahwa sejak sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Sukarno merupakan sosok populer yang telah mengalahkan popularitas tokoh-tokoh lain di Indonesia,⁵⁹ ia juga merupakan tokoh yang sangat dipuji rakyatnya dibandingkan dengan tokoh- tokoh lain pada masanya, padahal mayoritas rakyat tersebut jelas-jelas tidak paham dengan jargon-jargon politik yang banyak ia sampaikan.

Nilai-nilai amanah dalam masa kepemimpinan Sukarno dapat terrealisasi dengan tanggung jawab besar pemimpin besar revolusi tersebut dalam mewujudkan persatuan nasional yang telah ia bangun dan pertahankan dengan sungguh-sungguh. Di pihak lain, meskipun melaksanakan demokrasi, para politisi banyak yang menunjukkan rendahnya kejujuran dan tanggung jawab mereka terhadap nasib bangsa, terutama komitmennya terhadap persatuan di dalam negaranya yang terancam dengan banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, dan hal itu terjadi karena mereka terlalu sibuk dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya masing-masing.

⁵⁹ Ini dapat dibuktikan dengan pengakuan Syahrir pada Tan Malaka, ketika tokoh komunis nasionalis tersebut mengajak Syahrir untuk mengudeta kepemimpinan Sukarno dan akan digantikan olehnya. Lihat dalam J. D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Syahrir*, hlm. 186.

B. Relevansi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Masa Kini

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, masih maraknya tindakan kekerasan dalam kehidupan beragama dan beribadah, dan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta banyaknya bencana yang terus melanda hampir seluruh wilayah Indonesia tetapi kurang tertangani dengan baik, membuat mayoritas masyarakat Indonesia bertanya dan mengeluhkan di mana sebenarnya wujud negara sebagai sebuah kepemimpinan nasional yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan yang baik bagi seluruh warganya. Dalam setiap menghadapi berbagai persoalannya, masyarakat seperti bergerak sendiri tanpa ada peran negara untuk memberikan jalan dan pilihan terbaik untuk mengatasinya, bahkan negara cenderung menghalangi dan bukan sebagai mediator bagi proses penyelesaian masalah yang sedang diupayakan rakyatnya.

Sampai saat ini dalam kenyataannya, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Ini dibuktikan dengan daya beli masyarakat semakin merosot, semakin meningkatnya jumlah pengangguran, dan tingkat penghidupan rakyat yang semakin lama semakin menurun, serta yang tidak kalah menakutkan adalah, semakin meningkatnya jumlah bencana alam, yang salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah terlalu lama membiarkan proses pengrusakan sumber daya alam nasional yang telah lama terjadi.

Memang sejak orde baru tumbang, yang kemudian dilanjutkan dengan kelahiran orde reformasi, pada dasarnya orde yang kini dijalani seluruh bangsa Indonesia telah memberi kesempatan seluruh komponen bangsa untuk dapat menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara yang lebih baik dari pada sebelumnya, namun proses yang telah berlangsung untuk mengakhiri permasalahan bangsa yang makin menumpuk dan belum dapat menemukan kepastian untuk mengeluarkan bangsa besar tersebut dari keterpurukannya.

Bisa dikatakan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini lebih buruk dari pada masa sebelumnya, banyak fakta di sekitar kehidupan bangsa Indonesia yang menunjukkan hal tersebut, seperti semakin lama negara semakin tidak berdaya untuk melindungi rakyatnya dari ketidakadilan yang terjadi, negara juga membiarkan kekuatan kapitalisme global yang semakin meraja lelah untuk mengisap rakyat Indonesia dan menyengsarakan. Kesembronaan negara yang membiarkan aset-aset penting negara dikuasai oleh bangsa asing adalah sesuatu yang sangat disesalkan bersama-sama, padahal jelas-jelas negara-negara besar tersebut hanya memikirkan keuntungan mereka semata dari pada berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan bangsa Indonesia.

Orang-orang yang berkecimpung dalam penyelenggaraan negara baik yang ada di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif sampai hari ini belum dapat diharapkan dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukannya. Presiden dan wakilnya lebih menyibukkan diri dengan mempertahankan

kekuasaannya dan cenderung tidak mengurusi penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang lebih mendesak. Wakil rakyat lebih disibukkan dengan persoalan mengurusi kekuasaan dan masalah internal partai, dan tidak lagi mempedulikan aspirasi rakyat yang semakin sengsara dengan kebijakan negara yang ada, padahal dalam masa kampanye mereka telah banyak menebar janji tentang perubahan yang sangat diharapkan rakyat. Penegakan hukum juga masih setengah-setengah, karena lembaga yudikatif yang ada masih mandul dan belum bergerak secara progresif serta independen untuk menegakan keadilan, bahkan lembaga ini sekarang menjadi sarang mafia peradilan yang cenderung menjadi kepanjangan para penguasa dan kaum berduit seperti pada masa-masa sebelumnya.

Pemberlakuan sistem pemilihan langsung para pemimpin eksekutif dari tingkat pusat hingga daerah pada saat ini bisa dikatakan belum mendapatkan hasil yang diharapkan bersama, bahkan cenderung membahayakan persatuan bangsa. Pemilihan presiden memang berjalan cukup demokratis dan berhasil mendapatkan presiden yang dipilih mayoritas rakyat, namun secara umum kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokratis tersebut belum mampu mengatasi persoalan bangsa yang cukup menumpuk dan mendesak untuk diselesaikan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung juga belum mampu menghasilkan pemerintahan daerah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, bahkan di banyak daerah pilkada hanya menghasilkan kekisruhan sipil yang berbuntut kerusuhan dan konflik yang terus berkepanjangan, dan Lebih parahnya adalah semakin meningkatnya

jumlah korupsi di daerah-daerah yang memanfaatkan adanya momentum program otonomi daerah sebagai ajang untuk melakukan praktik tidak terpujinya.⁶⁰

Dalam menegakkan keadilan, pemerintah juga patut dipertanyakan komitmennya untuk menegakkan suatu yang sangat urgen bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan tersebut. Betapa banyak kasus yang terbengkalai dan tidak jelas penyelesaiannya, dan yang lebih ironis lagi kasus-kasus tersebut jelas-jelas kebanyakan merupakan berkaitan dengan hajat hidup bersama. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, sangat jelas kebobrokan lembaga peradilan di Indonesia dengan ditemukannya praktik suap yang melibatkan para Jaksa di institusi Kejaksaan Agung. Permasalahan di atas tentunya semakin menurunkan kredibilitas pemerintah dan rencana perubahan sejak reformasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti yang diharapkan rakyat selama ini, apalagi bila dikaitkan dengan terwujudnya masyarakat madani yang penuh dengan nilai-nilai Islam seperti pada masa nabi dalam wujud kehidupan bangsa Indonesia di masa modern.

Melihat kondisi tersebut, hancurnya negara kesatuan republik Indonesia bukanlah suatu yang mustahil akan terjadi dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Bayangan bangsa Indonesia akan menyusul negara-negara besar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang terpecah terus menghantui persatuan nasional yang telah lama diperjuangkan. Indikasi-indikasi tersebut sudah dapat

⁶⁰ Pilkada di Indonesia hanya bergerak pada tatanan normatif saja, dan esensi pilkada jarang tersentuh, bahkan pilkada masih disetir oleh kekuatan yang punya modal, hal itu sebagaimana pernyataan pengamat politik, Zukri Saad. Lihat dalam Kompas, *Indonesia ke Arah Bangsa yang Gagal*, Minggu 22 Juni, (Jakarta, 2008), hlm. 8.

terlihat dengan adanya sebagian daerah yang ingin berpisah dari NKRI karena merasa tidak diperlakukan secara adil dalam berbagai pembangunan oleh pemerintah pusat, hal ini juga ditambah dengan lemahnya pemerintah dalam menentukan kebijakan yang dapat menggelorakan semangat persatuan, seperti menjauhkan semangat primordialisme kedaerahan yang banyak muncul di berbagai daerah.

Tidak bisa dipungkiri penyebab kekacauan-kekacauan di negara Indonesia adalah belum terlaksananya nilai-nilai Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Memang gaung penegakan syariat Islam sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam tidak pernah surut suaranya sampai saat ini, bahkan ada kecenderungan aspirasi penegakan syariat Islam semakin hari semakin menguat saja dalam konstalasi perpolitikan nasional. Semakin meningkatnya jumlah organisasi keagamaan yang berbasis radikal dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan wujud nyata dari perjuangan yang membahayakan persatuan bangsa tersebut. Namun adanya organisasi-organisasi tersebut bukan menyelesaikan masalah dan malah sebaliknya, menambah masalah nasional dan mencoreng nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Islam, karena dalam pergerakannya selama ini mereka lebih bergerak melalui jalan kekerasan dalam menjalankan Islam dan melupakan pemahaman nilai-nilai Islam yang lebih substantif dan komprehensif, yang tentunya jauh dari nilai-nilai kekerasan seperti yang dipraktekkan oleh organisasi-organisasi Islam radikal yang ada.

Sebagai warga negara yang berbudaya dan bertanggung jawab, tentunya harapan akan adanya kehidupan yang lebih baik dengan melihat keindahan pelaksanaan aktif sebuah kehidupan demokratis yang sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai islam dalam tata negara tetap dapat tercipta di negara Republik Indonesia tercinta. Adanya kepemimpinan yang amanah, para pemimpin nasional yang mempunyai integritas yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang aspiratif merupakan idaman setiap warga negara yang mendiami bumi Indonesia. Negara yang demokratis yang memberikan Keleluasaan dan kebebasan, dengan didasarkan pada persamaan dan keadilan bagi setiap warganya untuk mencari penyelesaian yang terbaik tentunya sangat membantu semua komponen bangsa yang ada di segala bidang untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang telah berlangsung cukup lama. Penegakan keadilan dalam seluruh kehidupan masyarakat luas, yang salah satunya dengan membersihkan oknum-oknum mafia peradilan dalam institusi peradilan yang ada dan juga lebih responsif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang cukup mendesak, seperti ganti rugi korban lumpur Lapindo dan sejuta kasus lainnya adalah kebijakan yang sangat membantu untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang diharapkan seluruh warganya.

Memang tidak bijak melimpahkan semua kesalahan kepada pemerintahan yang ada, namun sebagai kepemimpinan nasional, bagaimanapun pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab untuk memberikan jaminan yang sungguh-sungguh agar tercipta kepemimpinan

nasional yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebenarnya upaya-upaya untuk melaksanakan kehidupan yang melandaskan pada kehidupan yang demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dengan adanya persamaan, kebebasan, keadilan telah diupayakan oleh sebagian komponen bangsa melalui adanya kajian atau forum-forum yang ada, dan upaya advokasi lembaga-lembaga swadaya yang ada juga cukup signifikan hasilnya bagi pembangunan bangsa, namun sampai saat ini komitmen dari pemerintahan yang ada untuk membantu melaksanakan kehidupan yang baik tersebut belum terlihat adanya. Sampai saat ini orang-orang pemerintahan masih sibuk dengan mempertahankan jabatannya masing-masing, di samping itu sistem yang ada juga masih sangat sedikit untuk memberi ruang bagi terciptanya perubahan yang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis yang berkepanjangan.

Demokrasi adalah pilihan terbaik bagi negara Indonesia, karena demokrasi sangat menjunjung tinggi musyawarah, persamaan, keadilan, dan kebebasan beragama, serta kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sebuah negara. Yang sangat penting diingat ialah, demokrasi sangat memberi peluang adanya koreksi dari adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, sehingga dimungkinkan setiap saat ada suatu perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan dijamin dalam kehidupan demokrasi, suatu negara kan mengalami kehidupan yang dinamis. Jangan sampai demokrasi yang sedang terbangun di Indonesia saat ini mati dibunuh oleh anaknya sendiri, karena hal itu sangatlah mungkin terjadi adanya, ini dibuktikan tidak pernah surutnya para ideolog Islam konservatif yang ingin mengganti Pancasila

melalui cara-cara demokrasi. Sangat ironis apabila pada suatu saat nanti ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi lain melalui penggunaan cara-cara demokrasi yang sedang berlaku, dan apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain yang cenderung otoriter, maka bisa dipastikan negara Indonesia akan terjerembab dalam lubang perpecahan dan kehancuran. Meskipun demokrasi yang sedang dijalani Indonesia saat ini masih belum mampu menyejahterahkan dan membawah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun inilah jalan terbaik yang dapat dijalani dan diraih pada saat ini. Dengan optimisme tinggi dalam menjalani demokrasi yang terus diupayakan perbaikannya, diharapkan nantinya masyarakat Indonesia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya, yang tentunya membawah masyarakat Indonesia hidup dengan limpahan kesejahteraan dan keadilan, serta menjadikan bangsa Indonesia diperhitungkan dalam percaturan dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap nilai-nilai Islam dalam revolusi Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Nilai-nilai Islam dalam masa kepemimpinan Sukarno sangatlah berpengaruh dalam masa kepemimpinan nasional pertama tersebut. Nilai musyawarah, nilai persamaan, nilai kebebasan dan nilai keadilan serta nilai amanah sebagai nilai-nilai Islam yang digunakan dalam penelitian ini, sejauh dari penelitian penulis merupakan nilai-nilai yang dapat mewarnai jalannya masa kepemimpinan yang berusaha mewujudkan adanya kehidupan bangsa yang jauh lebih baik dari pada di masa penjajahan bangsa asing yang terjadi pada masa sebelumnya. Kehidupan bernegara yang berlandaskan pada demokrasi yang sesuai dengan musyawarah, persamaan, kebebasan dan keadilan, serta amanah telah dapat dirasakan bangsa Indonesia dengan hengkangnya penjajah asing yang selama ini menjadi sumber masalah dan sangat mengekang kedaulatan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Musyawarah, persamaan, kebebasan, dan keadilan, serta amanah juga telah terwujud dengan adanya pelaksanaan sistem demokrasi parlementer, demokrasi yang sangat memberi keleluasaan para wakil sipil untuk mengekspresikan artikulasi politiknya dalam kehidupan bernegara. Meskipun keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam jalannya pemerintahan yang ada,

mamun sudah ada independensi lembaga peradilan pada masa demokrasi parlementer, yang itu menjadi modal berharga dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pemerintahan yang ada pada masa tersebut.

R. Saran-saran.

Kajian sejarah kepemimpinan Sukarno merupakan kajian yang sangat penting bagi keberlangsungan perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembangunan negara pada masa kini, sehingga dalam mengkaji kepemimpinan tersebut diperlukan kajian yang lebih luas dan komperhensif serta harus melalui berbagai aspek untuk dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang berguna bagi kesinambungan pencarian arah masa depan bangsa yang lebih mencerahkan. Sudah seharusnya kajian studi keislaman dalam melihat sejarah muslim tidak boleh lagi hanya terpaku pada simbolisme Islam, yang terkadang lebih bermakna arabisme dari pada berupaya menggali substansi nilai-nilai keislaman yang terkandung dari sejarah umat muslim itu sendiri, karena apabila kajian keislaman masih terpaku pada simbolisme Islam, maka umat muslim sangat dikhawatirkan akan kekurangan referensi dan khazanah sejarahnya dalam upayanya untuk mengembangkan perjuangannya di masa kini dan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy, terj. Salim, Abdul Bar, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta, Ketut Masagung Corporation, 2001.
- Adeney-Risakota, Bernard (Editor), *Keadilan dan Ham dalam Perspektif Agama-Agama*, bahan kuliah tidak diterbitkan.
- Aqiel Siradj, Said, *Islam kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta, Pustaka Ciganjur, Fatma Press, 1999.
- Baker, Anton dan Charis Zubair, Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan* terj, Prihantoro, Agus, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Esposito, John L., *Islam Warna Warni*, Jakarta, Paramadina, 2004.
- F. Eickelman, Dale dan Factori, James, *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1998.
- Fakhry, Majid, *Etika dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawy, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bahtar, Yogyakarta, Lkis, 2003.
- Federspiel, Howard M, *Labirin Ideologi Muslim, Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, terj. Ruslani dan Abdullah, Kurniawan, Jakarta, Serambi, 2004.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia “Transisi Menuju Demokrasi”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghofur,Waryono Abdul, *Tafsir Sosial, Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta, Elsaq, 2005.
- Haque, Ziaul, *Wahyu dan Revolusi*, terj. E. Setiyawati Al Khattab, Yogyakarta, Lkis, 2000.

Hearing, Bob, *Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka*, Jakarta, Hasta Mitra, 2003.

Hefner, Robert W, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso, Edisi XXI, Yogyakarta, Lkis, 2000.

Hery, Yunior Hafidh, *Tan Malaka dibunuh*, Yogyakarta, Resist Book, 2007.

Hossein Nasr, Seyyed, *The Heart of Islam*, Terj. Nurasiah Fakih Sutan Harahap, Bandung, Mizan, 2003.

Ismail, Faisal, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama, Respons dan Penerimaan Umat Islam Terhadap Pancasila*, Jakarta, LP3ES, 1980.

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung,Mizan.,1991.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.

Kurzman, Charles (Editor), *Wacana Islam Liberal*, Jakarta, Paramadina, 2001.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung, Mizan,1991.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, cet. ke-2, Yogyakarta, Teraju, 2004.

Latif, Yudi, *Intelelegensi Muslim dan Kuasa, Sejarah Intelelegensi Muslim Indonesia Pada Abad Ke-20.*

Legge, J. D. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik " Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-196)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

M.M, Darmawan, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, Bandung, CV. Hikayat Dunia, 2005.

Moesa, Ali Maschan, *NU Agama dan Demokrasi, Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Surabaya, Pustaka Dai Muda, 2002.

Muhajir, Ahmad, *Demokrasi Terpimpin menurut Idham Khalid dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Muhaimin, Yahya dan Andrew, Colin Mac (eds), *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University press, 1982.

M. Dahlan, Muhibbin (editor), *Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat?*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984.

Nugroho, Taufiq, *Hubungan Islam dan Pancasila*, Yogyakarta, Pustaka Padma, 2003.

Partanto, A, Pius dan Al Bary, M Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.

Prasetyo, Eko, *Islam kiri, Jalan Menuju Revolusi Sosial*, Yogyakarta, Insist Press, 2003.

Prasetyo, Eko, *Islam Kiri*, Yogyakarta, Insist Press, 2002.

Rahardjo, Imam Toto K, dan Sudarso, Suko (Editor), *Bung Karno, Islam Pancasila NKRI*. Jakarta, komunitas Nasionalis Religius Indonesia, 2006.

Ricklef, M. C, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, Bakar Bilfagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, dan Has Manadi, Jakarta, Serambi, 2005.

Roem, Mohamad, *Diplomasi= Ujung Tombak Perjuangan RI, kumpulan karangan*, Jakarta, Gramedia, 1989.

Romdhon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 1996.

Rose, Mavis, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, terj. Hermawan Sulistyo, Jakarta, Gramedia, 1991.

Ruhiyat, Panji Nugraha, *Dekrit Presiden dalam HTN di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- S. Mintz, Jeanne, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, terj. Zulhilmiyasri, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- S. M, Amin, , *Indonesia Dibawah Rezim “Demokrasi Terpimpin”*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.
- Sarjono, Agus. R. (editor), *Pembebasan Budaya-budaya Kita*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Shah, M. Aunul Abied (Editor), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung, Mizan, 2001.
- Soehino, *Sumber-Sumber Hukum Tata negara Indonesia*”, Yogayakarta, Liberty, 1985.
- Sugiharto, I. Bambang dan Agus Rahmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogayakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengamatan Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1970.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Dan M. Amin Rais*, Jakarta, Teraju, 2005.
- Tempo*, Edisi 25/XXXIIIIII/ 13-19 Agustus, Jakarta, 2007.
- Tuhuleley, Said (Penyunting), *Permasalahan Abad XX: Sebuah Agenda*, Yogyakarta, Sipress, 1993.
- Vrendenberg, Jacob *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1986.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama Lengkap : M. Alzim Suaidi Nas
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo 6 Februari 1982
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pahlawan No. 18 Desa Damarsi Rt 09 Rw 02
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Jatim
61252
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo 64 F Sapan Yogyakarta

B. Nama Orang Tua

Ayahanda : M. Nadzir (almarhum)
Pekerjaan : Petani
Ibunda : Sapekyah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Pahlawan no 18 Desa Damarsi Rt 09 Rw 02
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Jatim
61252

C. Pendidikan Formal

- (1986-1988) TK Al-Ihsan Damarsi Buduran Sidoarjo
- (1988-1991) MI Al-Ihsan Damarsi Buduran Sidoarjo
- (1991-1992) SDN Molek Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta Timur
- (1992-1994) SDI As-Safiyah Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta-Timur
- (1994-1995) SMPI As-Safiyah Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta-Timur
- (1994-1997) SMP Al-Ikhlas Jatibening Bekasi Jabar
- (1997-2000) SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- (2001-.....) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Pengalaman Organisasi

- (2002-2003) Divisi wacana dan kajian HMI komisariat Ushuluddin
- (2002-2003) UKM Olahraga UIN SUKA
- (2001-2004) LPKM Kopma UIN SUKA
- (2004-2005) Takmir Masjid Al-Ihsan JL. Kali Urang
- (2005-2006) Takmir Masjid Nurul Islam Pedak Baru Gowok
- (2006-2008) Takmir Masjid Baitul Arqom Sorowajan

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy, terj. Salim, Abdul Bar, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta, Ketut Masagung Corporation, 2001.
- Adeney-Risakota, Bernard (Editor), *Keadilan dan Ham dalam Perspektif Agama-Agama*, bahan kuliah tidak diterbitkan.
- Aqiel Siradj, Said, *Islam kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta, Pustaka Ciganjur, Fatma Press, 1999.
- Baker, Anton dan Charis Zubair, Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan* terj, Prihantoro, Agus, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Esposito, John L., *Islam Warna Warni*, Jakarta, Paramadina, 2004.
- F. Eickelman, Dale dan Factori, James, *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1998.
- Fakhry, Majid, *Etika dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawy, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bahtar, Yogyakarta, Lkis, 2003.
- Federspiel, Howard M, *Labirin Ideologi Muslim, Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, terj. Ruslani dan Abdullah, Kurniawan, Jakarta, Serambi, 2004.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia “Transisi Menuju Demokrasi”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghofur,Waryono Abdul, *Tafsir Sosial, Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta, Elsaq, 2005.
- Haque, Ziaul, *Wahyu dan Revolusi*, terj. E. Setiyawati Al Khattab, Yogyakarta, Lkis, 2000.

Hearing, Bob, *Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka*, Jakarta, Hasta Mitra, 2003.

Hefner, Robert W, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso, Edisi XXI, Yogyakarta, Lkis, 2000.

Hery, Yunior Hafidh, *Tan Malaka dibunuh*, Yogyakarta, Resist Book, 2007.

Hossein Nasr, Seyyed, *The Heart of Islam*, Terj. Nurasiah Fakih Sutan Harahap, Bandung, Mizan, 2003.

Ismail, Faisal, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama, Respons dan Penerimaan Umat Islam Terhadap Pancasila*, Jakarta, LP3ES, 1980.

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung,Mizan.,1991.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.

Kurzman, Charles (Editor), *Wacana Islam Liberal*, Jakarta, Paramadina, 2001.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung, Mizan,1991.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, cet. ke-2, Yogyakarta, Teraju, 2004.

Latif, Yudi, *Intelelegensi Muslim dan Kuasa, Sejarah Intelelegensi Muslim Indonesia Pada Abad Ke-20.*

Legge, J. D. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik " Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-196)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

M.M, Darmawan, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, Bandung, CV. Hikayat Dunia, 2005.

Moesa, Ali Maschan, *NU Agama dan Demokrasi, Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Surabaya, Pustaka Dai Muda, 2002.

Muhajir, Ahmad, *Demokrasi Terpimpin menurut Idham Khalid dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Muhaimin, Yahya dan Andrew, Colin Mac (eds), *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University press, 1982.

M. Dahlan, Muhibbin (editor), *Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat?*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984.

Nugroho, Taufiq, *Hubungan Islam dan Pancasila*, Yogyakarta, Pustaka Padma, 2003.

Partanto, A, Pius dan Al Bary, M Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.

Prasetyo, Eko, *Islam kiri, Jalan Menuju Revolusi Sosial*, Yogyakarta, Insist Press, 2003.

Prasetyo, Eko, *Islam Kiri*, Yogyakarta, Insist Press, 2002.

Rahardjo, Imam Toto K, dan Sudarso, Suko (Editor), *Bung Karno, Islam Pancasila NKRI*. Jakarta, komunitas Nasionalis Religius Indonesia, 2006.

Ricklef, M. C, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, Bakar Bilfagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, dan Has Manadi, Jakarta, Serambi, 2005.

Roem, Mohamad, *Diplomasi= Ujung Tombak Perjuangan RI, kumpulan karangan*, Jakarta, Gramedia, 1989.

Romdhon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 1996.

Rose, Mavis, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, terj. Hermawan Sulistyo, Jakarta, Gramedia, 1991.

Ruhiyat, Panji Nugraha, *Dekrit Presiden dalam HTN di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- S. Mintz, Jeanne, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, terj. Zulhilmiyasri, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- S. M, Amin, , *Indonesia Dibawah Rezim “Demokrasi Terpimpin”*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.
- Sarjono, Agus. R. (editor), *Pembebasan Budaya-budaya Kita*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Shah, M. Aunul Abied (Editor), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung, Mizan, 2001.
- Soehino, *Sumber-Sumber Hukum Tata negara Indonesia*”, Yogayakarta, Liberty, 1985.
- Sugiharto, I. Bambang dan Agus Rahmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogayakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengamatan Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1970.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Dan M. Amin Rais*, Jakarta, Teraju, 2005.
- Tempo*, Edisi 25/XXXIIIIII/ 13-19 Agustus, Jakarta, 2007.
- Tuhuleley, Said (Penyunting), *Permasalahan Abad XX: Sebuah Agenda*, Yogyakarta, Sipress, 1993.
- Vrendenberg, Jacob *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1986.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama Lengkap : M. Alzim Suaidi Nas
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo 6 Februari 1982
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pahlawan No. 18 Desa Damarsi Rt 09 Rw 02
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Jatim
61252
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo 64 F Sapan Yogyakarta

B. Nama Orang Tua

Ayahanda : M. Nadzir (almarhum)
Pekerjaan : Petani
Ibunda : Sapekyah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Pahlawan no 18 Desa Damarsi Rt 09 Rw 02
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Jatim
61252

C. Pendidikan Formal

- (1986-1988) TK Al-Ihsan Damarsi Buduran Sidoarjo
- (1988-1991) MI Al-Ihsan Damarsi Buduran Sidoarjo
- (1991-1992) SDN Molek Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta Timur
- (1992-1994) SDI As-Safiyah Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta-Timur
- (1994-1995) SMPI As-Safiyah Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta-Timur
- (1994-1997) SMP Al-Ikhlas Jatibening Bekasi Jabar
- (1997-2000) SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- (2001-.....) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Pengalaman Organisasi

- (2002-2003) Divisi wacana dan kajian HMI komisariat Ushuluddin
- (2002-2003) UKM Olahraga UIN SUKA
- (2001-2004) LPKM Kopma UIN SUKA
- (2004-2005) Takmir Masjid Al-Ihsan JL. Kali Urang
- (2005-2006) Takmir Masjid Nurul Islam Pedak Baru Gowok
- (2006-2008) Takmir Masjid Baitul Arqom Sorowajan